

**OPTIMALISASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI
PADA MASYARAKAT MISKIN DITINJAU DARI
PEMIKIRAN EKONOMI AL-MAWARDI**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

SYALU EKA PRATIWI
NIM 1711130040

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**

BENGKULU, 2021 M/ 1442 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang ditulis oleh Syalu Eka Pratiwi, NIM. 17111300430 dengan Judul **“Optimalisasi Bantuan Pangan Non Tunai Pada Masyarakat Miskin Ditinjau Dari Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi”**, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan disepakati sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

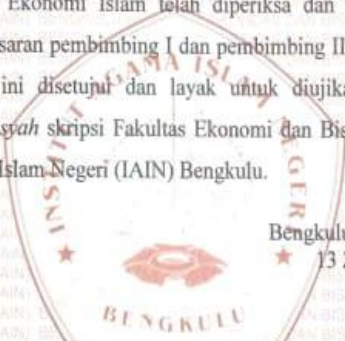
Pembimbing I

Bengkulu, 24 Juni 2021 M
13 Zulkaidah 1442 H

Pembimbing II

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003

Yosi Arisandy, M.M
NIP.198508012014032001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51172-53879-, Faksimili (0736) 51171-51172

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul: **“Optimalisasi Bantuan Pangan Non Tunai Pada Masyarakat Miskin Ditinjau Dari Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi”** oleh, Syalu Eka Pratiwi, NIM. 1711130040, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah di uji dan di pertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:


Hari : **Jumat**
Tanggal : **30 Juli 2021 M/ 20 Zulhijah 1442 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

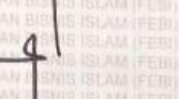
Bengkulu, **03 Agustus 2021 M**
24 Zulhijah 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dra. Hj. Fatimah Yunus, M.A
NIP.196303192000032003
Penguji I


Sekretaris

Yosi Arisandy, M.M
NIP.198508012014032001
Penguji II


Dra. Hj. Fatimah Yunus, M.A
NIP.196303192000032003


Eddy Sowan, M.M
NIDN.2020032001

Mengetahui,
Dekan,




Dra. Asnijini, M.A
NIP.197304211998032003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Optimalisasi Bantuan Pangan Non Tunai Pada Masyarakat Miskin Ditinjau Dari Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi” Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 30 Juli 2021 M
20 Zulhijah 1442 H

Mahasiswa yang menyatakan



Syaly Eka Pratiwi
NIM. 1711130040

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

“(QS. Al-Insyirah: 5-6)”

Apa yang kamu kejar tidak akan kamu dapatkan, tetapi apa yang
kamu doakan akan kamu dapatkan (Unknow)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah..., puji syukur beriringan dengan doa dari hati yang tulus ku persembahkan karya sederhanaku ini yang kutulis dengan penuh suka, duka dan air mata. Hari ini satu kebahagiaan telah kuraih telah kunikmati, satu cita-cita berhasil ku raih tetapi cita-cita itu tidaklah berhenti disini perjuanganku masih belum selesai sampai disini. Kebahagiaanku hari ini berhasil menciptakan senyuman kelegaan dan bercampur rasa haru di beberapa wajah yang selama ini mendoakan dengan tulus untuk kelancaran dalam penulisan karya sederhana ini. Aku percaya bahwa setiap kesulitan itu ada kemudahan dan Allah selalu bersama hambanya yang penyabar. Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua ku Ayah (Dwi Waluyo) dan Ibu (Desmawita) yang telah melahirkan, membesarkanku dengan limpahan kasih sayang, yang selalu mendoakan dengan hati yang tulus untuk setiap langkahku dan mendidikku dengan sangat baik. Terima kasih Ayah dan Ibu berkat doa, kasih sayang, dan semangat selama ini yang telah di berikan sekuat dan semampunya.
2. Kepada adik-adik ku: Syahrul Ramadhan, Syari Oktavia, Syalza Salsa Billa, Syazkia Nacita dan Syabil Bima

Marohim. Terima kasih atas dukungannya, semangat, segala pengorbanan dan bantuan yang selalu diberikan untuk ku dan menjadi *support system* ke dua ku.

3. Bapak Drs. M. Syakroni, M. Ag selaku pembimbing I dan Ibu Yosí Arisandy M.M selaku pembimbing II, yang telah bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis demi terselesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
5. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
6. Teman-teman seperjuangan EKIS, khususnya Sahabat-sahabatku, Putri, Isti, Resti dan Indah yang telah memberi warna di setiap hari-hariku selama di bangku perkuliahan.

ABSTRAK

Optimalisasi Bantuan Pangan Non Tunai
Pada Masyarakat Miskin Ditinjau Dari
Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi
Oleh Syalu Eka Pratiwi, NIM 1711130040

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang ada di Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu ditinjau dari pemikiran ekonomi Al-Mawardi tentang peran negara terhadap masyarakat miskin. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan Bantuan Pangan Non Tunai terhadap masyarakat miskin dalam memenuhi sebagian pangan untuk mengurangi beban pengeluaran setiap bulannya terhadap KPM sudah membantu KPM dalam mengurangi beban pengeluaran pembelian bahan pangan setiap bulannya namun bantuan pangan ini belum tersalurkan dengan baik karena tidak adanya kendali dalam memilih komoditas bahan pangan yang dibeli/diperoleh dan tidak tepat sasaran masyarakat yang menerima bantuan sehingga bantuan ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan sebagian pangan pada masyarakat miskin di Kelurahan Tanjung Agung. Sesuai dengan pemikiran Al-Mawardi bahwa negara berperan terhadap pemenuhan hajat masyarakat tentang negara dan aktivitas ekonomi dimana negara dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kolektif setiap warga negaranya dan pengelolaan keuangan negara melalui *Baitul Mal* bahwa untuk membiayai belanja negara dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya. Sama halnya dengan pengelolaan penggunaan anggaran penyaluran bantuan sosial BPNT dapat lebih efektif lagi dengan benar-benar menyalurkan bantuan kepada KPM agar bantuan ini tersalurkan dengan optimal.

Kata Kunci: Optimalisasi, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Masyarakat Miskin, Al-Mawardi.

ABSTRACT

*Optimization of Non-Cash Food Aid On the Poor
Viewed From Al-Mawardi's Economic Thought
By Syalu Eka Pratiwi, NIM 1711130040*

This study aims to determine the distribution of Non-Cash Food Aid in Tanjung Agung Village, Bengkulu City in terms of Al-Mawardi's economic thought about the role of the state towards the poor. This type of research is a qualitative research that uses field research methods (Field Research). Sources of data used in the research are the results of interviews, observations, documentation and literature studies. The results showed that Non-Cash Food Assistance to the poor in fulfilling some food to reduce the burden of monthly expenditure on KPM had helped KPM in reducing the burden of spending on food purchases every month but this food aid had not been distributed properly because there was no control in choosing raw material commodities. The food purchased/obtained is not targeted at the people who receive the assistance so that this assistance has not fully met the needs of some of the food for the poor in Tanjung Agung Village. In accordance with Al-Mawardi's thinking that the state plays a role in fulfilling people's needs regarding the state and economic activities where the state is needed to meet the collective needs of every citizen and the management of state finances through Baitul Mal that is to finance state expenditures in meeting the basic needs of every citizen. Similarly, the management of the use of the budget for the distribution of social assistance, BPNT can be even more effective by actually distributing aid to KPM so that this assistance is distributed optimally.

Keywords: Optimization, BPNT (Non-Cash Food Aid), the Poor, Al-Mawardi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Optimalisasi Bantuan Pangan Non Tunai Pada Masyarakat Miskin Ditinjau Dari Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi” Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah (EKIS) Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Eka Sri Wahyuni, SE, MM, selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Drs. M. Syakroni, M.Ag selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, masukan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Yosi Arisandy, MM. selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, semangat, saran dan nasehat dengan penuh kesabaran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Kepala perpustakaan IAIN Bengkulu yang telah menyediakan fasilitas buku sebagai referensi penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, 30 Juli 2021 M
20 Zulhijah 1442 H

Syalu Eka Pratiwi
NIM.1711130040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Batasan Masalah	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis dan pendekatan Penelitian.....	18
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	19
3. Subjek/Informan Penelitian	20
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	20
5. Teknik Analisis Data.....	24
H. Sistematika Penulisan	24

BAB II KAJIAN TEORI

A. Optimalisasi Bantuan Sosial	26
1. Pengertian Optimalisasi.....	26
2. Konsep Bantuan Sosial.....	26
3. Jenis-Jenis Bantuan Sosial	28
B. Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai	28
1. Asal Mula Bantuan Pangan Non Tunai.....	28
2. Definisi Bantuan Pangan Non Tunai.....	31

3.	Penerima Manfaat BPNT	31
4.	Tujuan, Manfaat dan Besaran Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai.....	33
5.	Mekanisme Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai.....	35
6.	Faktor-Faktor penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.....	37
C.	Masyarakat Miskin Menurut Ekonomi Islam	38
1.	Pengertian Masyarakat	38
2.	Pengertian Kemiskinan	39
3.	Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan.....	41
4.	Pengentesan Kemiskinan.....	43
D.	Pemikiran Ekonomi Islam AL-Mawardi.....	47
1.	Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.....	47
2.	Biografi Al-Mawardi.....	48
3.	Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi.....	49
E.	Kerangka Konseptual.....	60

BAB III GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

A.	Profil Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu .	61
B.	Kondisi Geografis	62
C.	Kondisi Demografis	63
D.	Kondisi Sosial	63
E.	Kondisi Pendidikan.....	64
F.	Kondisi Mata Pencaharian	65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Hasil Penelitian	66
1.	Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Tanjung Agung	66
2.	Peran Negara Pada Masyarakat Miskin Melalui Bantuan Pangan Non Tunai	71
B.	Pembahasan.....	74

1. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Pemenuhan Sebagian Pangan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Tanjung Agung..... 74
2. Optimalisasi Bantuan Pangan Non Tunai Pada Masyarakat Miskin Kelurahan Tanjung Agung Di Tinjau Dari Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi 77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 83
- B. Saran-Saran..... 85

DAFTAR PUSTAKA 86
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kelompok Usia
Tabel 3.2 Lulusan Pendidikan Umum.....
Tabel 4.1 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BPNT di Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem ekonomi Islam, tujuan ekonomi diarahkan pada tiga hal, yaitu: (1) pemenuhan kebutuhan dasar manusia, (2) pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai tujuan negara melalui pemenuhan kebutuhan penduduk yang mengalami perkembangan, memperoleh kekuatan dalam mempertahankan diri, mempertahankan identitas budaya, dan membantu entitas serupa dalam tugas yang sama membangun masyarakat, dan (3) menjamin adanya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan yang selalu mengalami perkembangan.¹ Hal ini dilakukan dengan menjamin kebebasan asasi dan kebutuhan dasar dalam kehidupan sosial yang tertib dan diatur oleh peraturan pemerintah yang adil.²

Menurut Al-Mawardi, seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan dalam suatu negara dapat mewujudkan kesejahteraan umat, karena agama dapat terpelihara dengan kekuasaannya dan diamankan dengan baik oleh masyarakat. Seorang pemimpin pemerintahan dengan kekuasaannya akan

¹Baca pemikiran Al-Mawardi Tentang Hubungan Individu, Masyarakat, dan Negara dalam Ahmad Wahban, *Al-Mawardi: Ra'id al-Fikr al-Siyasi al-Islami* (Iskandariah: Dar al-Jami'ah al-Jadidah li al-Nashr, 2001), h. 25-38.

²Munawar Iqbal (ed.), *Distributive Justice Need Fulfillment in an Islamic Economy* (Islamabad: IIIIE & Leicester UK, The Islamic Foundation, 1988), h. 56-57.

mempersatukan aspirasi masyarakat yang berbeda, mencegah konflik dan disintegrasi sosial, penguasaan barang-barang publik oleh seseorang atau kelompok masyarakat.

Jika Allah membedakan dan menempatkan manusia sebagai makhluk yang mempunyai berbagai kebutuhan serta kelemahan alamiah, hal ini karena pertolongan dan kasih sayang Allah kepada manusia, agar manusia dapat berperilaku secara baik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mencegah para pemberontak dan pembangkang, mengarahkan pemerintahan dalam mencapai tujuan-tujuannya, menjaga ajaran agama agar diamalkan, melindungi jiwa, kekayaan dan kehormatan warga negara, serta menjamin mata pencaharian.

Di samping itu, Islam memerintahkan manusia untuk mengembangkan sumber daya material dan manusiawi untuk menegakkan keadilan, kebaikan, dan kedamaian yang dapat membawa kemajuan demi terciptanya sebuah masyarakat yang adil, makmur dan mulia dalam naungan ridha Ilahi, meminjam bahasa Al-Qur'an, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*, serta untuk keselamatan manusia di dunia dan di akhirat (QS. Ali Imran, 3:110).³

³Sindonews, *Surah Ali Imran Ayat 110*, dikutip dari <https://kalam.sindonews.com/ayat/110/3/ali-imran-ayat-110> pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, Pukul 11.45 WIB

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung pada Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut:

“Penanganan Fakir miskin adalah upaya yang terarah, Terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.”

Peraturan menteri tersebut kemudian diciptakannya sebuah inovasi program bantuan yang bernama Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/*E-Warung* yang bekerjasama dengan Bank (Pedoman Pelaksanaan BPNT).⁴

Dengan adanya peran pemerintah dalam penyaluran bantuan BPNT, pada laporan perekonomian Provinsi Bengkulu konsumsi masyarakat pada triwulan I laporan didukung pula oleh peningkatan kemampuan belanja seiring terus berlangsungnya penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta membaiknya harga komoditas utama daerah yang menjadi sumber penghasilan mayoritas penduduk Bengkulu.⁵

Pada periode triwulan II 2020, performa penyerapan, baik untuk program PKH dan Bantuan Sembako, berlangsung baik dan tepat sasaran. Pada triwulan II 2020, penyerapan PKH sudah mencapai 92,32% dengan nominal Rp56,07 miliar Untuk Bantuan Sembako pada triwulan II 2020, penyerapannya sudah mencapai 91,62% dengan nominal Rp71,76 miliar. Penyerapan bantuan Sembako di Provinsi Bengkulu masih membutuhkan penyerapan yang lebih luas untuk mencapai titik optimal. Performa ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan I 2020,

⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui E-Warung KUBE.

⁵ Laporan Perekonomian Provinsi Bengkulu Periode Februari 2020, h.46

dimana penyerapan PKH mencapai realisasi 98,51% dengan nominal 61,25 miliar dan penyerapan BPNT mencapai realisasi sebesar 90,42% dengan nominal 82,52 miliar.⁶

Dengan peningkatan penyerapan penyaluran program pangan murah ini dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Distribusi pangan yang disubsidi melalui bantuan non tunai pemerintah sudah berjalan melalui *E-Warung* dimana masyarakat sekitar dapat membeli pangan beras dan telur dengan harga murah tidak seperti harga yang ada di pasar tradisional ataupun modern yang ada di Bengkulu. Pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017** tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, yang kemudian dituangkan lebih rinci melalui **Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 pasal 23** tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, besaran manfaat BPNT adalah Rp110.000/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai kebutuhan KPM di *E-Warung*.⁷ Pada observasi awal melalui wawancara dengan pemilik *e-warung* penyalur bantuan pangan dan melihat langsung kondisi masyarakat penerima di Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu, masih banyak dilapangan yang mengeluhkan bantuan BPNT ini dikarena bantuan ini hanya dapat ditukar

⁶ Laporan Perekonomian Provinsi Bengkulu Periode Agustus 2020, h.70

⁷ Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019, Cetakan Pertama, September 2019

dengan telur dan beras saja. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana optimalisasi dari peranan bantuan ini yang berupa penyaluran distribusi pangan melalui program *E-Warung* dalam pemenuhan sebagian pangan masyarakat golongan menengah kebawah sesuai dengan tujuan program tersebut sehingga program tersebut tidak menjadi hal yang mubazir. Sehubungan dengan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Optimalisasi Bantuan Pangan Non Tunai Pada Masyarakat Miskin Ditinjau Dari Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi (Studi di Kelurahan Tanjung Agung, Kota Bengkulu).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyaluran bantuan pangan non tunai terhadap pemenuhan sebagian kebutuhan pangan masyarakat miskin Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu?
2. Bagaimana optimalisasi peran pemerintah pada masyarakat menengah ke bawah (miskin) melalui bantuan pangan non tunai ditinjau dari pemikiran ekonomi Al-Mawardi.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di lapangan di Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu
2. Untuk dapat mengoptimalkan Bantuan Pangan Non Tunai dari penerapan kepemimpinan Al-Mawardi pada negara semasa kepemimpinannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat menengah kebawah

D. Batasan Masalah

Pembahasan Batasan Masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian saja. Pada penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai telah menjadi program nasional bagi pemerintahan Indonesia. Bantuan ini juga telah ada di Kota Bengkulu. Berdasarkan identifikasi masalah, penulis memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang dilakukan yaitu pada pengoptimalisasian Bantuan Pangan Non Tunai di daerah Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu. Ruang lingkup menentukan konsep utama dari permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian dapat dimengerti dengan mudah dan baik. Batasan Masalah penelitian sangat

penting dalam mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat terus mengingat dan mengulang serta memperkaya ilmu pengetahuan dari apa yang sedang terjadi dan dapat menerapkan pemikiran ekonomi tokoh-tokoh pakar ekonomi Islam pada umumnya dalam setiap kegiatan ekonomi dan bagi civitas akademi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah pada khususnya.

Dapat menjadi salah satu sarana pembelajaran dan pemahaman mengenai pemikiran ekonomi Al-Mawardi dalam memimpin sebuah Negara yang adil. Dan memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya yang menjadi salah satu sumber acuan bagi keperluan ilmiah dan bahan pertimbangan dalam menghadapi permasalahan yang sama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam optimalisasi kebutuhan konsumsi pangan murah akan dipasarkan sesuai dengan syariat islam yang dipaparkan atau dituangkan dalam pemikiran tokoh

ekonomi Al-Mawardi tentang peran negara terhadap masyarakat miskin, baik itu bagi:

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian, rujukan dan pengetahuan dalam bidang ekonomi syariah
- b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, khususnya jurusan ekonomi syariah hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai awal bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian tentang peran pemimpin Negara terhadap masyarakat miskin dengan menerapkan dari pemikiran ekonomi Al-Mawardi.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat atau peneliti selanjutnya bagaimana pemikiran Al-Mawardi tentang peran pemimpin negara dalam mengurus masyarakat menengah kebawah.

F. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal Nasional yang disusun oleh Hoirul Amri berjudul “Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Hasan Al-Mawardi”. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa al-Mawardi merupakan salah satu tokoh penting dalam pemikiran ekonomi Islam. Pemikirannya tentang negara dan aktivitas ekonomi, konsep pinjaman publik, perpajakan, urgensi lembaga keuangan negara (*baitul*

maal), dan konsep keadilan masih sangat relevan dalam konteks kekinian. Selain itu, Al-Mawardi juga memberikan pencerahan kepada kita semua tentang relasi antara rakyat dan penguasa, hak dan kewajiban yang melekat pada keduanya serta implikasi-implikasi logis dari ketidakpatuhan menjalankan kontrak dari relasi yang dibuat tersebut.⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hoirul Amri adalah sama-sama menjelaskan tentang bagaimana pemikiran ekonomi dari Al-Mawardi tentang bagaimana relasi antara penguasa terhadap rakyat tentang hak dan kewajiban yang melekat diantara keduanya. Namun terdapat perbedaan pada penelitian Hoirul Amri dari segi objek penelitian yang dijelaskan yaitu secara umum tentang pemikiran-pemikiran ekonominya, dan pada penelitian ini yang penulis teliti sekarang terdapat objek dan subjek yang lebih rinci untuk diteliti.

2. Jurnal Nasional yang disusun oleh Ika Surya Kharismawati, yang berjudul “Implementasi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Melalui E-Warung Di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya”. Adapun hal yang dijelaskan adalah Berdasarkan penelitian yang diperoleh dan Implementasi

⁸ Hoirul Amri, “Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Hasan Al-Mawardi”, Dosen FAI Universitas Muhammadiyah Palembang jurnal *Economica Sharia*, Volume 2 Nomor 1 Edisi Agustus, (2016)

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dengan menggunakan teori Van Meter Van Horn adalah ukuran dan tujuan kebijakan juga menjelaskan bagaimana implementasi suatu kebijakan dilaksanakan. Tujuan kebijakan menjadi penting karena menyangkut alasan mengapa kebijakan tersebut dikeluarkan dan apa alasannya kebijakan itu dibuat. Akan tetapi Masyarakat hanya mengetahui garis besarnya saja jika bantuan tersebut mendapatkan bantuan berupa bahan pangan. Sedangkan pada tujuan sudah tertera bahwa ada beberapa tujuan pemerintah dalam program ini. Tujuan program Bantuan Pangan ini belum berjalan dengan semestinya karena ada salah satu tujuan yaitu meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM. Sumber daya merupakan elemen yang sangat penting dalam menjalankan sebuah kebijakan publik dan hal yang menjadi sangat krusial adalah sumber daya. Adapun sumber daya yang mempengaruhi implementasi adalah sumber daya manusia, financial dan waktu. Keberhasilan implementasi memerlukan keempat sumberdaya tersebut. Sumber daya manusia yang menjalankan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui *E-Warung* di Kelurahan Sidosermo

Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Sumber daya manusia yang menjalankan program-program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui *E-Warung* di Kelurahan Sidosermo yaitu Koordinator Kelurahan, Pendamping Desa serta masyarakat setempat. Sumber daya finansial atau dana pada program Bantuan Pangan Non Tunai ini berasal dari Kementerian Sosial yang langsung di transfer ke rekening-rekening KPM sebesar Rp 110.000,-/ bulan. Untuk sumber daya dana sudah sesuai dengan yang ditentukan dalam pedoman pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sumber daya waktu untuk pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai sudah efektif. Karena uang yang tersalurkan setiap bulan tidak ada kendala. Sumber daya fasilitas sendiri mengalami kendala yaitu pada mesin EDC yang sering terjadi gangguan, sehingga proses implementasi terganggu.⁹

Terdapat persamaan dalam penelitian dari Ika Surya Kharismawati tentang bagaimana implementasi Bantuan Pangan Non Tunai yang sebenarnya dilapangan, alasan kebijakan dibuat serta apa yang menjadi tujuan pemerintah dalam penyaluran bantuan ini. Namun

⁹ Ika Surya Kharismawati, "*Implementasi Bantuan Pangan Non-Tunai (Bpnt) Melalui E-Warung Di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya*", Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, (2017)

perbedaan dari penelitian ini ialah dalam penelitian yang dilakukan oleh Ika Surya Kharismawati tidak merujuk pada bagaimana pemikiran tokoh pemikir ekonomi islam dalam penyaluran bantuan pangan non tunai ini dilaksanakan.

3. Skripsi, penelitian yang dilakukan oleh Ayuni Zalita Pepi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Melalui Elektronik warung. Bantuan Pangan Non Tunai, disingkat BPNT, adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut *E-Warung* yang bekerja sama dengan Bank Penyalur (Pedoman Umum BPNT, 2018:3). (Kemensos, 2017:9) Bantuan sosial pangan non tunai dilakukan dengan cara mengirimkan uang sebesar Rp 110.000,- per bulan bagi penerima program melalui sebuah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS merupakan instrumen penyaluran yang dapat dibelanjakan barang-barang sembako seperti beras dan/ telur sesuai kebutuhan di *E-Warung*, bantuan dapat disisakan dan terakumulasi dalam rekening Bantuan

Pangan. Adanya program ini yaitu diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat melalui pemenuhan kebutuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).¹⁰

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ayuni Zalita Pepi ialah sama-sama meneliti tentang Bantuan Pangan Non Tunai yang dapat memberikan informasi tentang bantuan ini secara umum. Namun terdapat perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian ini lebih merujuk tentang pandangan tentang bagaimana sisi politik dengan memperhatikan pandangan hukum sosial terhadap bantuan sosial ini sedangkan pada penelitian yang diteliti penulis bagaimana pandangan dari sudut pandang pemikir ekonomi Islam Al-Mawardi.

4. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Imal Alimah Akmal, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

¹⁰ Ayuni Zalita Pepi, “*Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Melalui Elektronik warung*”, (Skripsi : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019)

Muhammadiyah Makassar 2020 yang berjudul “Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pra sejahtera di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, menjelaskan bahwa Program BPNT merupakan program pengganti dari Program Beras Sejahtera (Rastra) yang memiliki beberapa permasalahan. Dalam (PSKK UGM, 2017), menjelaskan bahwa pergantian Program RASTRA menjadi Program BPNT, dikarenakan dalam pelaksanaan program Rastra terdapat beberapa permasalahan yang cukup kompleks yaitu :

- a. Indikator Tepat Sasaran Masih ditemukannya *Exclusion Error* dan *Inclusion Error* yang tinggi. *Exclusion error* misalnya, masih terdapat rumah tangga yang seharusnya menerima Rastra, akan tetapi tidak terdaftar menjadi penerima RASTRA, sehingga masyarakat tidak mendapat bantuan sosial Rastra tersebut. Sementara, *Inclusion Error* sebaliknya, yaitu terdapat rumah tangga yang tidak berhak untuk menerima Rastra, justru menerima bantuan tersebut
- b. Indikator Tepat Jumlah Masih banyak terdapat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang hanya menerima 4-6 kg per-bulan dari

yang 4 seharusnya sebanyak 15 kg per-bulan. Selain itu, RTS-PM juga harus membayar bahan pangan (terutama beras) lebih mahal dari yang seharusnya, yaitu Rp 1.600 per-kg. Ketiga, untuk indikator tepat waktu masih sering terjadi keterlambatan dalam pendistribusian bahan pangan, yang dimana pendistribusian tersebut seharusnya dilakukan setiap bulan¹¹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Alimah Akmal yaitu sama seperti yang diteliti penulis yaitu bagaimana implentasi bantuan pangan non tunai disalurkan melalui akun elektronik warung kepada keluarga penerima manfaat dan juga persamaan pada metode peneltian yaitu penelitian lapangan. Namun perbedaan penelitian skripsi yang dilakukan oleh Alimah Akmal yaitu penelitian ini masih diteliti secara umum dan belum memperhatikan bagaimana sudut pandang pemikir tokoh ekonomi terhadap penyaluran bantuan pangan ini sehingga dapat memaksimalkan bantuan sesuai dengan syariat agama Islam.

5. Jurnal Nasional, penelitian yang dilakukan oleh Rashda Diana yang berjudul “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam” yang memaparkan bahwa

¹¹ Imal alimah akmal, “*Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*” (Skripsi : Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

Pemikiran politik al-Mawardi mampu menerangkan realitas dan praktik politik pada masanya, yang sering memberikan justifikasi terhadap kekuasaan khalifah. Baginya, kekhilafahan adalah komitmen agama dan aktivitas politik. Pemikirannya mengandung segi-segi normatif atau idealistis dari sebuah pemerintahan atau tuntunan politik Islam. Al-Mawardi telah memberikan wawasan mengenai sebuah teori negara yang pada akhirnya diakui oleh negara-negara dunia sebagai salah satu pemikiran yang mampu membangun kajian politik Islam saat ini. Dalam pengelolaan negara Al-Mawardi lebih mengutamakan pendekatan institusional (kelembagaan), yaitu dengan memaksimalkan fungsi kelembagaan dan memantapkan struktur negara. Pembagian kelembagaan negara al-Mawardi yang sistematis ini harus dipahami dalam rangka bahwa khilafah merupakan institusi tertinggi dalam negara, meskipun tidak serta merta bisa bertindak otoriter, karena kedaulatan tetap di tangan rakyat di dalam bingkai nilai-nilai agama. Namun pada suatu saat institusi tertinggi bisa diambil alih oleh *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*. Pandangan Al-Mawardi tentang kontrak sosial juga merupakan pemikiran modern yang sekarang banyak dianut oleh bangsa-bangsa maju. Kontrak sosial ini meniscayakan adanya *check and balance* antara

pemerintah dan rakyat. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat berbuat sewenang-wenang, karena ada koridor-koridor yang harus diikutinya.¹²

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Risdha Diana ini yaitu tentang pemikiran Al-Mawardi terhadap konsep kenegaraan dalam islam, dimana objek negara ini sama-sama diteliti tentang peran negara dalam mengatur dan membuat kebijakan-kebijakan pada suatu negara. Namun perbedaan pada penelitian ini yaitu pada penelitian yang akan penulis teliti pada batasan yang lebih kecil yaitu tentang bantuan pangan non tunai melalui pendekatan pemikiran ekonomi Al-Mawardi.

6. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hakim dan Ahmad Danu Syaputra yang berjudul “Al-Quran dan Pengentasan Kemiskinan” jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Al-Qur’an di dalam menjelaskan keadaan faqir dan miskin tidak bertolak dari ada atau tidaknya harta benda yang dimiliki oleh orang faqir dan miskin, melainkan pada besar atau kecilnya potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak di dalam melepaskan diri dari masalah kemiskinan yang membelenggu mereka. penulis menyimpulkan bahwa Al-Qur’an memiliki solusi yang komprehensif. Ada tiga jalur yang al-Qur’an tempuh dengan objek yang berbeda. Jalur

¹² Rashda Diana “*Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*” Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Vol.13, No.1, (Mei 2017).

pertama ditujukan kepada personal umat Islam di dalam memberikan panduan tentang sikap hidup dan tingkah laku yang seharusnya ditanamkan pada diri setiap individu, seperti anjuran untuk bekerja, serta anjuran untuk hidup hemat dan sederhana. Di samping itu al-Qur'an memberikan pujian bagi orang yang mampu menahan diri dari meminta-minta (*al-ta'afuf*) sehingga orang menyangka bahwa ia adalah orang yang kaya (QS. Al-Baqarah: 273). Kemudian jalur kedua, ditujukan kepada personal umat Islam umumnya, dan khususnya kepada masyarakat untuk membiasakan diri berbagi dan memberikan pemberian kepada orang-orang yang membutuhkan, baik pemberian tersebut pemberian yang sifatnya wajib ataupun pemberian yang sifatnya sukarela. Dan jalur terakhir, pesan Al-Qur'an yang ditujukan kepada para pemimpin atau penguasa khususnya dan umumnya kepada umat Islam untuk menegakkan keadilan dan membangun struktur sosial yang bebas dari eksploitasi, penindasan, dan konsentrasi kekayaan pada segelintir orang. Dan dalam struktur sosial yang seperti ini, terdapat nilai kebenaran yang lain, yaitu keadilan dibidang sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Pada jalur ketiga inilah peran pemerintah sangat dibutuhkan, sebagai kontrol dan pemegang kebijakan atas segala aktifitas ekonomi yang dijalani

baik di tingkat lokal ataupun di tingkat global, agar tidak ada satu pihak pun yang dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat luas.¹³

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hakim dan Ahmad Danu Syaputra yaitu tentang penjelasan kategori kemiskinan dalam pandangan Islam, serta perbedaan pada penelitian ini ialah tentang objek yang akan di teliti oleh penulis yaitu penulis bukan hanya meneliti tentang kategori kemiskinan saja.

7. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Bayu Adi Saputro, Irwan Noor, Siswidiyanto, Implementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo), Jurusan Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 12, Hal. 2028-2032, Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang kompleks baik di negara berkembang maupun di negara maju. Pemerintah telah mencanangkan berbagai program untuk mengatasi masalah kemiskinan, salah satu program dari pemerintah adalah Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (RASKIN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Raskin di Desa Sidoharjo berbeda dari ketentuan yang ditetapkan.

¹³ Lukman Hakim dan Ahmad Danu Syaputra yang berjudul “*Al-quran dan Pengentasan Kemiskinan*” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Iinstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534, (2020).

Proses implementasi dibagi menjadi dua proses. Adapun implementasi Program Raskin di Desa Sidoharjo ini dapat dilihat dari sasaran dan manfaat, proses pendistribusian serta pengawasan. Faktor yang mendukung implementasi program Raskin adalah adanya komitmen dari agen pelaksana, koordinasi antar instansi serta respon masyarakat yang antusias. Sedangkan faktor penghambat program ini adalah berkaitan dengan anggaran/biaya, basis data, kurangnya pengawasan, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial dan juga kondisi geografis.¹⁴

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Bayu Adi Saputro, Irwan Noor dan Siswidiyanto yaitu sama-sama tentang bantuan yang disalurkan pemerintah dalam pemenuhan sebagian kebutuhan pangan masyarakat yaitu Beras Untuk Masyarakat Miskin (RASKIN), karena sebelumnya Bantuan Pangan Non Tunai masih disebut atau masih dalam bentuk Program Beras Untuk Masyarakat Miskin yang kemudian di inovasi sekarang menjadi BPNT. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Bayu Adi Saputro dkk yaitu penelitian ini hanya merujuk pada bentuk

¹⁴ Bayu Adi Saputro, Irwan Noor, Siswidiyanto, *Implementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan* (Studi Di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo), Jurusan Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 12, (2014).

objek bantuan secara umum yang disalurkan oleh pemerintah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yang mencoba menggambarkan dan menjadikan acuan perkembangan kajian pemikiran tokoh ekonomi Islam terhadap fenomena yang terjadi dimasa sekarang.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Reseach*) dimana sumber data yang digunakan adalah Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber data asli.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan terjun ke lapangan mempelajari penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menggambarkan, menganalisis, menafsirkan, serta menarik kesimpulan dari proses tersebut. Metode penelitian kualitatif sering disebut

¹⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 129

metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting)¹⁶

Dalam penelitian ini data secara langsung diperoleh dari data pertama dilokasi penelitian atau obyek penelitian. Data primer yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Subjek penelitian ini ialah Pendamping penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kasi Pemerintahan di Kelurahan Tanjung Agung dan Masyarakat Penerima Manfaat (KPM) BPNT.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini yaitu selama pertengahan Desember 2020 sampai dengan Juli 2021 yang terhitung dari penentuan topik, objek penelitian, dan identifikasi masalah penelitian hingga penelitian ini selesai. Dan lokasi yang dijadikan penelitian adalah Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu. Peneliti memilih lokasi ini karena terdapat masalah tentang pilihan kendali terhadap penerima bantuan pangan dalam memilih pangan dan data terkini penerima bantuan pangan yang layak belum di perbarui yang menjadi laporan dan keluhan masyarakat di Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu di anggap paling relevan ditinjau dengan pemikiran ekonomi Al-Mawardi dimana Al-Mawardi membahas mengenai

¹⁶ Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018, h. 8

peran pemerintah terhadap tugas-tugas negara dalam rangka membantu pemenuhan dasar setiap warga negara dan keberadaan Baitul Mal dalam mengelola keuangan negara seperti contoh anggaran negara untuk masyarakat pada program penyaluran BPNT.

3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang data yang dibutuhkan. Adapun subjek data dalam penelitian ini adalah Pendamping Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, Keluarga Penerima Manfaat, dan Pemerintahan di lingkungan Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

Sumber data adalah subjek yang akan memberikan data dan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti. Adapun sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian:

1) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁷

Dalam Penelitian ini data secara langsung diperoleh dari data pertama lokasi penelitian atau

¹⁷ Sugiyono, *Metode...*, h. 231.

subjek penelitian. Data primer yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Subjek penelitian ini adalah pendamping penyalur Bantuan Pangan Non Tunai, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dari penelitian ini terdiri dari jurnal, artikel, undang-undang dan buku yang mendukung data sekunder.¹⁸

Langkah pengumpulan data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dengan cara mencari dan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, mencari literatur-literatur yang membahas tentang pemikiran Al-Mawardi, mencari data-data terkini tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang terjadi, penulis memperoleh data sekunder dari buku, jurnal penelitian, skripsi, website, dokumen yang

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed*, h. 225

berkaitan dengan BPNT, dan dokumen lain yang berkenaan dengan penelitian ini.

b. Teknik pengolahan Data:

Adapun Tehnik pengolaan data ini meliputi:

1) Observasi awal

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung ke lapangan. Menurut patton, observasi memiliki tujuan untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas yang berlangsung, orang yang terlibat aktivitas dan makna dari kejadian yang diamati.¹⁹ Penulis melakukan observasi ini dengan cara terlibat ataupun tidak terlibat dalam penyaluran BPNT di Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide. Sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁰ Penulis melakukan wawancara semi terstruktur kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti Kelompok Penerima Manfaat BPNT, pendamping BPNT dan pemerintahan setempat di Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu.

¹⁹ Sugiyono, *Metode...*, h. 231.

²⁰ Sugiyono, *Metode...*, h. 231.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan buktibukti.²¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan dokumentasi/studi pustaka dengan membaca dan mempelajari data-data/informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam(triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat diinformasikan kepada orang lain. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus.²² Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif. Adapun tahap analisis data adalah:

a. Reduksi data

²¹ Sugiyono, *Metode...*, h. 231.

²² Sugiyono, *Metode...*, h. 245-246

Reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Hasil dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan sesuai dengan formatnya masing-masing. Penelitian ini melakukan reduksi data dalam situasi sosial tertentu dengan berfokus pada masyarakat miskin penerima bantuan, pendamping dan pemerintahan di Kelurahan Tanjung Agung.

b. Penyajian data

Setelah semua data diformat berdasarkan instrumen pengumpul data dan telah berbentuk tulisan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Miles dan Huberman menganjurkan untuk menggunakan matrik dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian.

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Kesimpulan merupakan suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti mengecek kembali

kebenaran untuk memastikan tidak ada kesalahan yang kemungkinan dilakukan.

H. Sistematika Penulisan

Rangkaian penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan masalah yang ada. Wujud dari susunan sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini meliputi latar belakang masalah yang membahas mengenai kajian dalam penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, meliputi tinjauan umum tentang konsep optimalisasi bantuan pangan secara umum, bagaimana golongan masyarakat pada umumnya, seperti apa pandangan islam terhadap golongan masyarakat miskin serta pengentasan kemiskinan, tentang Bantuan Pangan Non Tunai yang meliputi mengapa bantuan pangan non tunai ini direalisasikan, baik berupa definisi dan asalmula penyaluran bantuan pangan non tunai dan pemikiran ekonomi Al-Mawardi

tentang peran Negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian berupa letak Geografis kelurahan Tanjung Agung kota Bengkulu, Jumlah Penduduk penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai, Mata Pencaharian masyarakat Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu dan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Lapangan yang sebenarnya.

BAB IV Bab ini berisi tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu terhadap pemenuhan sebagian pangan, peran negara terhadap masyarakat miskin pada masa kepemimpinan Al-Mawardi, dan optimalisasi bantuan pangan non tunai ditinjau dari pemikiran ekonomi Al-Mawardi di Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu

BAB V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Optimalisasi Bantuan Sosial

1. Pengertian Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik.²³

2. Konsep Bantuan Sosial

Bansos dikururkan melalui anggaran Negara (APBN/APBA), bantuan ini diberikan kepada individu,

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia web, dikutip dari <http://kbbi.web.id/optimalisasi>, diakses pada Selasa 13 April 2021, pukul 15.03 WIB

kelompok atau komunitas yang secara ekonomi, lemah dan kelayakan untuk menerimanya diuji terlebih dahulu dengan tes kemiskinan. Bansos ini dapat bersifat sementara (bencana alam) atau bersifat tetap (cacat dan lanjut usia). Dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang atau melalui transfer. Sifat bantuan biasa diberikan dengan syarat ataupun tanpa syarat. Ada empat jenis Bansos. *Pertama*, bantuan dan pelayanan kesejahteraan sosial, yaitu bantuan kepada golongan masyarakat miskin, diberikan berbasis lembaga (Panti, KUBE, BPNT). *Kedua*, bantuan dana berupa kupon makanan atau dana *cash* untuk biaya hidup. *Ketiga*, bantuan subsidi sementara untuk masyarakat yang mengalami kehilangan mata pencaharian karena bencana alam. *Keempat*, bantuan kompensasi atas kebijakan pemerintah (Subsidi BBM), bantuan untuk korban penggusuran.²⁴

Salah satu bentuk kebijakan publik adalah kebijakan sosial, semakin maju suatu negara, semakin tinggi perhatian negara pada kebijakan sosial. Negara perlu berperan aktif dalam melaksanakan kebijakan sosial karena negara adalah institusi *absah* yang memiliki kewenangan untuk menarik pajak dari rakyat dan karenanya negara paling berkewajiban menyediakan

²⁴ Amru Alba dan Rudi Kurniawan, *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin*, (Aceh: Unimal Press, 2019), h. 36

pelayanan sosial dasar bagi warganya. Dalam masyarakat yang beradab, negara tidak boleh membiarkan satu orang pun berada dalam posisi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kata 'sosial' memiliki beragam pengertian. Kata sosial mengandung pengertian umum dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan kegiatan yang menyenangkan. Misalnya, olah raga, rekreasi dan arisan. Kata sosial diartikan sebagai lawan dari individu. Kata sosial memiliki pengertian sebagai sekelompok orang seperti masyarakat dan komunitas.²⁵

3. Jenis-jenis bantuan sosial

Jenis-Jenis Bansos untuk Organisasi dan Masyarakat antara lain: bantuan hibah untuk perseorangan, untuk orang tidak mampu, untuk orang sakit, dan lain sebagainya. Jenis bantuan untuk pendidikan diantaranya: Bos, bantuan untuk siswa/i, bantuan siswa miskin, Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa dari pemerintah, dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dari swasta, beasiswa dari partai, dari organisasi masyarakat, dari organisasi pemerintah seperti beasiswa dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), beasiswa dari perseorangan, misalnya mengajukan permohonan ke bupati, menteri dan pejabat

²⁵ Amru Alba dan Rudi Kurniawan, *Kebijakan Pemberian Bantuan...*, h. 37-38

lainnya, bisa juga dari pengusaha. Sedangkan jenis bantuan/hibah untuk masyarakat ekonomi lemah diantaranya: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Beras Pra Sejahtera (RASTRA)/BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Kartu Indonesia Pinter (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), rehap rumah tidak laya huni, hibah ternak, dan lainnya.²⁶

B. Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai

1. Asal mula Bantuan Pangan Non Tunai

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara nontunai pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Keuangan *Inklusif* tanggal 26 April 2016. Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai dengan menggunakan sistem perbankan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan

²⁶ Amru Alba dan Rudi Kurniawan, *Kebijakan Pemberian Bantuan...*, h. 52

mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan.²⁷

Lebih lanjut pada Ratas tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi tanggal 16 Maret 2016, Presiden memberikan arahan bahwa mulai Tahun Anggaran 2017 penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) agar dilakukan melalui kupon elektronik (*E-voucher*) sehingga memenuhi prinsip 6 T yaitu Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Kualitas, Tepat Waktu, Tepat Jumlah dan Tepat Administrasi. *E-voucher* ini digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli beras serta bahan pangan bernutrisi, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan. Dengan demikian, tujuan Program Bantuan Pangan secara non tunai adalah untuk meningkatkan ketepatan sasaran, memberikan gizi yang lebih seimbang dan lebih banyak pilihan dan kendali kepada masyarakat miskin mendorong usaha eceran rakyat, memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin dan mengefektifkan anggaran. Dalam jangka panjang, penyaluran bantuan secara non tunai diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat.²⁸

²⁷ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*, tahun 2019, h.2

²⁸ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia, *Pedoman...*, h.3

Penyaluran Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 Kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, bantuan pangan diperluas ke seluruh Kota dan Kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran nontunai. Mulai tahun 2018, Subsidi Rastra juga dialihkan menjadi bantuan sosial yang disebut Bansos Rastra. Dengan demikian, Bantuan Sosial Pangan disalurkan ke masing-masing Kabupaten/Kota dalam bentuk nontunai atau natura, yaitu tetap dalam bentuk beras. Sebagian Kabupaten yang sarana prasarana penyaluran non tunainya belum memadai, tetap menyalurkan Rastra tetapi tanpa harga tebus yang harus dibayarkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tahun 2019, Program BPNT terus diperluas ke Kabupaten/Kota yang pada 2018 masih melaksanakan Program Bansos Rastra Untuk perluasan tahun 2019, pelaksanaan BPNT akan dilakukan dengan menggunakan dua mekanisme. Pertama, menggunakan mekanisme yang sudah berjalan sejak tahun 2017. Kedua, menggunakan mekanisme khusus untuk wilayah Kabupaten yang sesuai dengan penilaian Tim Pengendali dan diputuskan oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial.²⁹

²⁹ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

2. Definisi Bantuan Pangan Non Tunai

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut *E-Warong* yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.³⁰

Penyaluran program bantuan pangan secara non tunai mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 Kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, bantuan pangan akan diperluas ke seluruh Kota dan Kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai. Mulai tahun 2018, subsidi Rastra juga dialihkan menjadi bantuan sosial. Dengan demikian, mulai tahun 2018 Bantuan Pangan akan disalurkan ke masing-masing Kabupaten/Kota dalam bentuk non tunai atau natura, yaitu tetap dalam bentuk beras. Sebagian Kabupaten yang sarana dan prasarana penyaluran non tunainya belum memadai, tetap menyalurkan Rastra namun tanpa harga tebus yang harus dibayarkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).³¹

Indonesia,*Pedoman...*,h.4

³⁰ Tim Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pangan Secara Non Tunai, *Pedoman...*, h.5

³¹ Tim Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pangan Secara Non Tunai, *Pedoman...*, h.3

3. Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai

Secara umum sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No.20 Tahun 2019, penerima manfaat BPNT adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, yang namanya termasuk didalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) BPNT dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. DPM BPNT bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP). DPM BPNT yang telah difinalisasi oleh Pemerintah Daerah dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP.³² Pengurus KPM ditentukan menurut urutan prioritas sebagai berikut:

- (1) Diutamakan atas nama perempuan di dalam keluarga, baik sebagai kepala keluarga atau sebagai pasangan kepala keluarga.
- (2) Jika tidak ada perempuan dalam keluarga, baik sebagai kepala keluarga atau sebagai pasangan kepala keluarga, maka Pengurus KPM adalah

³² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

anggota keluarga perempuan yang berumur di atas 17 tahun dan memiliki dokumen identitas.

- (3) Jika KPM tidak memiliki anggota perempuan di atas 17 tahun, maka Pengurus KPM adalah laki-laki kepala keluarga.
 - (4) Jika laki-laki kepala keluarga tidak ada, maka dapat diajukan anggota keluarga laki-laki yang berumur di atas 17 tahun dan memiliki dokumen identitas kependudukan sebagai Pengurus KPM.
 - (5) Jika KPM tidak memiliki anggota keluarga lain yang berumur 17 tahun ke atas dan memiliki dokumen identitas kependudukan, maka KPM dapat diwakili oleh anggota keluarga lainnya di dalam satu KK atau wali yang belum terdaftar dalam KPM BPNT sebagai Pengurus KPM.
 - (6) Bagi KPM yang merupakan penerima PKH, maka yang dimaksud sebagai Pengurus KPM BPNT merujuk pada individu yang telah ditetapkan sebagai Pengurus PKH.
4. Tujuan, Manfaat dan Besaran Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai
- a. Tujuan program Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut:
 - 1) Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.

- 2) Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM.
 - 3) Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM.
 - 4) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
 - 5) Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).
 - 6) Mendorong usaha eceran rakyat
- b. Manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
 - 2) Meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial.
 - 3) Meningkatkan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
 - 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.
 - 5) Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan

kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)

c. Besaran Manfaat

Dijelaskan dalam peraturan menteri sosial no.11 tahun 2018 pasal 23, Besaran BPNT adalah Rp. 110.000/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai, dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan telur sesuai kebutuhan di *E-warong*. Apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam Akun Elektronik Bantuan Pangan. Pemilihan komoditas beras dan telur dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai berdasarkan tujuan peningkatan nutrisi Keluarga Penerima Manfaat. Penambahan jenis komoditas untuk mencapai tujuan tersebut akan dievaluasi.

5. Mekanisme Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai

Mekanisme penyaluran BPNT dilakukan melalui tahapan: registrasi dan/atau pembukaan rekening; edukasi dan sosialisasi; penyaluran; dan pembelian barang.³³

a. Registrasi dan/atau pembukaan rekening

³³ Peraturan Menteri Sosial No.20 Tahun 2019

Meliputi pembukaan rekening secara kolektif, pencetakan kartu, aktivasi, dan distribusi KKS (Kartu Keluarga Sejahterah). Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM BPNT dilakukan oleh Bank Penyalur berkoordinasi dengan Direktorat Jendral Penanganan Fakir Miskin dan tim Koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan registrasi dan/atau pembukaan rekening melalui tahapan:

- 1) Pemberitahuan kepada KPM BPNT
- 2) Pemberitahuan bahwa keluarga tersebut termasuk daftar KPM BPNT
- 3) Informasi bahwa KPM BPNT yang namanya tertera di dalam format pemberitahuan dan mengikuti proses regristrasi KPM BPNT
- 4) Membawa dokumen pendukung untuk mengikuti proses regristrasi yaitu surat pemberitahuan, identitas asli seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga, atau dokumen lain yang mendukung.
- 5) Formulir pembukaan rekening yang diperoleh dari kantor cabang bank penyalur disampaikan KPM BPNT bersama surat pemberitahuan dengan dilengkapi dokumen yang menjadi syarat pembukaan rekening oleh KPM BPNT.

b. Edukasi dan Sosialisasi

Sasaran edukasi dan sosialisasi ditujukan kepada pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, perangkat kecamatan, desa/kelurahan/nama lain, atau pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, *e-warung*, KPM BPNT

c. Penyaluran

Proses penyaluran BPNT dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya. Proses penyaluran dilaksanakan melalui aplikasi OM-SPAN sesuai dengan peraturan jendral perbendaharaan Kementerian Keuangan mengenai mekanisme konfirmasi dan penyampaian informasi penyaluran bantuan sosial program pangan non tunai.

Penyaluran BPNT terdiri dari 2 tahap, pertama adalah Transfer Dana Bantuan Pangan dan berikutnya Notifikasi kepada KPM.

- 1) Bank penyalur membukakan akun elektronik bantuan pangan untuk masing-masing KPM berdasarkan DPM-1 perubahan yang diterima dari Kementerian Sosial.
- 2) Pemindah bukuan dana bantuan pangan dari rekening Kementerian Sosial pada Bank Penyalur ke Akun Elektronik Bantuan Pangan

KPM dilakukan 30 (tiga puluh) dari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Negara ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur.

d. Pembelian Barang

Pembelian barang dilaksanakan oleh KPM menerima BPNT yang besaran nilai bantuan ditetapkan oleh menteri sesuai dengan kemampuan keuangan negara. BPNT tidak dapat diambil tunai, namun hanya dapat digunakan untuk pembelian barang berupa bahan pangan yang telah ditentukan dengan KKS dan *personal identification number* di *E-Warung*. Bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM BPNT adalah berupa beras dan/atau telur. KPM BPNT wajib membelanjakan seluruh dana bantuan yang diterimanya di KKS pada *E-Warung*. KPM BPNT dalam melakukan transaksi pembelian di *E-Warung* dapat memilih bahan pangan yang ditentukan sesuai kebutuhan.

6. Faktor-Faktor Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

- a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin, negara melaksanakan penanganan fakir miskin dengan melakukan penyaluran bantuan sosial pangan secara non tunai dan akuntabel;
- b. Untuk menciptakan penyaluran bantuan sosial pangan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan mendorong

keuangan *inklusif*, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.

C. Masyarakat Miskin Menurut Ekonomi Islam

1. Pengertian Masyarakat

Banyak deskripsi yang dituliskan oleh para pakar mengenai pengertian masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius*, berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”.

Umumnya perbedaan masyarakat berdasarkan kepemilikan materi disebut kelas sosial (*social class*). Menurut M. Arifin Noor secara umum kelas sosial dapat dibagi kedalam tiga golongan, yakni:

a. Kelas atas (*upper class*)

Mereka adalah golongan yang kaya raya seperti kelompok konglomerat, kelompok eksekutif dan seterusnya. Pada kelas ini segala kebutuhan hidup

dapat terpenuhi dengan mudah sehingga pendidikan anak memperoleh prioritas utama, karena anak yang hidup pada kelas ini memiliki sarana dan prasarana yang memadahi dalam belajarnya dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tambahan sangat besar. Sehingga kondisi demikian tentu akan membangkitkan semangat anak untuk belajar karena fasilitas belajar mereka dapat terpenuhi oleh orangtua mereka.

b. Kelas menengah (*middle class*)

Kelas menengah biasanya diisi oleh kaum profesional dan para pemilik toko dan bisnis yang lebih kecil. Kedudukan orang tua dalam masyarakat terpendang, perhatian mereka terhadap pendidikan anak-anak terpenuhi dan mereka tidak merasa khawatir akan kekurangan pada kelas ini, walaupun penghasilan yang mereka peroleh tidaklah berlebihan tetapi mereka mempunyai sarana belajar yang cukup dan waktu yang banyak untuk belajar.

c. Kelas bawah (*lower class*)

Menurut Mulyanto Sumardi, kelas bawah adalah golongan yang memperoleh pendapatan atau penerimaan sebagai imbalan terhadap kerja mereka yang jumlahnya jauh lebih sedikit dalam kebutuhan pokoknya. Golongan ini antara lain pembantu rumah

tangga, pengangkut sampah dan lain-lain. Penghargaan mereka terhadap kehidupan dan pendidikan anak sangat kecil dan sering kali diabaikan karena ini sangat membebankan mereka.³⁴

2. Pengertian Kemiskinan

Secara etimologis, kemiskinan berasal dari kata “miskin” yang berarti tidak berharta dan serba kurang (berpenghasilan sangat rendah). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemiskinan merupakan situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.³⁵

Menurut Parsudi Suparlan, kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat kehidupan yang rendah, yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat. Standar kehidupan ini secara langsung berpengaruh terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, standar pendidikan, dan tingginya kriminalitas yang muncul dalam masyarakat³⁶

³⁴ Muliyanto Sumardi dan Hans-Dieter Evers, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), h. 80-81.

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia web, dikutip dari <http://kbbi.web.id/miskin>, diakses pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, Pukul 14.00 WIB

³⁶ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: YOI, 1995), h. 11.

Sedangkan dalam Al-Quran Lafadz miskin merupakan *ism masdar* yang berasal dari *sakana-yaskunu-sukun/miskin*. Dilihat dari asalnya *sakana-sukun*, kata ini memiliki makna diam, tetap atau reda. Al-Isfahani dan Ibn Manzur mengartikan kata ini sebagai “tetapnya sesuatu setelah ia bergerak”. Di samping itu juga bisa diartikan “tempat tinggal”. Jika dilihat dari makna aslinya yang berarti “diam”, maka apabila ditarik arti secara istilah yaitu orang yang tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan diamnya itulah yang menyebabkan kefaqirannya. Ia tidak dapat memperoleh sesuatu dikarenakan ia tidak bergerak atau tidak ada kemauan atau peluang untuk bergerak (QS. al-Kahfi: 79).

3. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Berikut ini, isyarat al-Qur’an yang membicarakan tentang faktor penyebab kemiskinan yang dialami umat manusia.³⁷

a. Malas dan tidak sungguh-sungguh di dalam berusaha.

Memang al-Qur’an tidak pernah menyebutkan malas secara langsung sebagai faktor penyebab kemiskinan, kata malas (*kaf-sin-lam*) dalam al-Qur’an hanya terdapat pada dua surat saja (QS. Al-Nisa: 142 Dan Al-Taubah: 45), dan keseluruhannya berbicara

³⁷ Lukman Hakim , Ahmad Danu Syaputra, *Al-Qur’an dan Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534

tentang sifat orang munafiq yang apabila mereka mendidirikan shalat, mereka melaksanakannya dengan malas dan berat. Namun pada beberapa ayat yang lainnya, banyak perintah Allah agar umat Islam bekerja dan berusaha, serta mengeluarkan segenap potensi yang dimiliki dalam keadaan apapun sehingga dapat terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Isyarat ini nampak jelas ketika mengkisahkan Maryam melahirkan Nabi Isa. Maryam diperintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma agar buahnya yang ranum dapat berguguran meskipun ia dalam keadaan yang sedang lemah (QS. Maryam: 22-26). Hikmah dari kisah Maryam di atas adalah bahwa meskipun seseorang berada dalam keadaan lemah sekalipun maka hendaklah ia tetap memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya dan tidak berputus asa dari rahmat Allah. Di samping itu banyak perintah di dalam al-Qur'an agar umat Islam mau berkerja dan berusaha mencari rezeki yang tersebar di muka bumi (QS. Al-Taubah: 105, QS. Al-Mulk: 15).

b. Boros dan berlebih-lebihan

Sikap boros dan berlebih-lebihan dapat menyebabkan pelakunya terjerumus kedalam masalah kemiskinan, karena itu di dalam al-Qur'an Allah melarang umat Islam untuk bersikap boros,

menghambur-hamburkan harta, serta berlebih-lebihan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra: 26-27, Dan Surat Al-‘Araf: 31.

c. Kikir dan enggan berbagi dengan sesama

Ayat Al-Quran banyak memerintahkan untuk berbagi dan bersedekah, serta larangan untuk bersikap kikir, sebagaimana di dalam al-Qur’an surat al-Isra ayat 29 dan surat al-Nahl ayat 27 Namun di dalam bersedekah al-Qur’an pun memberikan petunjuk agar sedekah itu dilakukan secara wajar, tidak terlalu kikir dan tidak pula terlalu berlebihan (QS. al-Furqan: 67).

d. Serakah di dalam mencari harta sehingga memunculkan kerusakan di muka bumi.

keserakahan telah membuat manusia lupa akan keseimbangan alam yang harus dijaga, daratan dan lautan dieksploitasi secara besar-besaran sehingga menyebabkan kerusakan alam. Dari kerusakan alam ini secara langsung dapat merugikan banyak orang yang bergantung kepada alam dan otomatis berdampak kepada berkurangnya penghasilan yang mereka dapat. Karena itu al-Qur’an melarang eksploitasi besar-besaran terhadap alam sehingga menyebabkan keseimbangan alam terganggu. Di dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa telah nampak

kerusakan di daratan dan di lautan kerana ulah tangan manusia (QS. al-Rum: 41).

- e. Sistem dan struktur yang dibangun pada suatu masyarakat yang jauh dari nilai-nilai keadilan dan penuh dengan diskriminasi dan eksploitasi

Al-Qur'an menjelaskan bahwa salah satu penyebab munculnya masalah kemiskinan di tengah-tengah umat manusia disebabkan karena adanya perlakuan dzalim dan ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya. Dengan kata lain munculnya kemiskinan ini dikarenakan sistem yg berlaku pada suatu masyarakat yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak berdaya di dalam melepaskan diri dari belenggu kemiskinan

4. Pengentasan Kemiskinan

Dalam masyarakat Islam, seseorang tidak boleh dibiarkan walaupun ia *ahlu dzimmah* (non-Muslim yang hidup dalam masyarakat Islam) kelaparan, tanpa pakaian, hidup menggelandang, tidak memiliki tempat tinggal, atau kehilangan kesempatan membina keluarga. Ada 5 sarana yang digunakan Islam untuk mewujudkan kehidupan tersebut yaitu:³⁸

- (1) Sarana Pertama: Bekerja

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Musykilah Al-Faqr wakaifa 'Aalajaha al-Islam*, Ter., Syafril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan", Jakarta: Gema Insani Press, 1995, h. 24-25.

Bekerja adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang, baik sendiri atau bersama orang lain untuk memproduksi suatu komoditi atau memberikan jasa. Bekerja merupakan senjata pertama untuk memerangi kemiskinan. Ia juga merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk memakmurkan bumi dengan manusia sebagai khalifah seizin Allah. Islam tidak membatasi suatu pekerjaan secara khusus kepada seseorang, kecuali demi pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Islam tidak akan menutup peluang kerja bagi seseorang, kecuali bila pekerjaan itu akan merusak dirinya atas masyarakat secara fisik ataupun mental. Setiap pekerjaan yang merusak diharamkan oleh Islam. Dengan bekerja, seseorang akan memperoleh penghasilan, laba, atau imbalan, yang dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan pokoknya beserta keluarganya.

(2) Sarana Kedua: Jaminan Sanak Saudara/Kerabat yang Berkelapangan

Islam menuntut setiap individu melawan kemiskinan dengan bekerja dan berusaha. Islam bertekad menyelamatkan dan mengangkat mereka dari lembah kemiskinan serta mencegah mereka dari

tindakan mengemis dan meminta-minta. Dalam hal ini, Islam menjadikan seluruh kerabat saling menopang dan menunjang yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, dan yang mampu mengulurkan tangan kepada yang tidak mampu. Dengan prinsip ini, hubungan antarkerabat dipererat, kesadaran untuk saling membantu pun menjadi makin tinggi. Hal ini disebabkan oleh terjalinnya hubungan silaturahmi yang kuat dan ikatan kekeluargaan yang kental³⁹

(3) Sarana Ketiga: Zakat

Islam menyuruh semua orang yang mampu bekerja dan berusaha mencari rezeki untuk menutupi kebutuhan diri dan keluarganya. Orang yang tidak kuat bekerja, tidak mempunyai harta warisan, atau tidak mempunyai simpanan untuk memenuhi kebutuhannya, berada dalam tanggungan kerabatnya yang berkecukupan. Namun, tidak semua orang miskin mempunyai kerabat berkecukupan, baik dari jalur hubungan warisan maupun dari jalur hubungan keturunan

Allah menentukan hak mereka orang miskin dan tidak mampu dalam harta orang berada (orang kaya) secara tegas dan pasti yaitu zakat. Tujuan

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Musykilah Al-Faqr wakaifa 'Aalajaha al-Islam*, Ter., Syafril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemis...", h. 72-73.

utama zakat adalah menghapuskan kemiskinan. Zakat pertama-tama diberikan kepada orang-orang miskin. Pada beberapa kesempatan Rasulullah SAW, menyebutkan bahwa mereka yang berhak menerima zakat hanyalah orang-orang miskin karena tujuan utamanya adalah menghapus kemiskinan. Ketika mengutus *Mu'adz* ke Yaman, Rasulullah memerintahkannya untuk mengambil sebagian harta orang-orang kaya di negeri itu lalu memberikannya kepada kaum fakir di kalangan mereka juga.⁴⁰

(4) Sarana Keempat: Jaminan *Baitul Maal* dengan Segala Sumbernya

Dalam Islam, sumber dana utama pemerintah untuk menghapuskan kemiskinan dan mengangkat kehidupan kaum miskin tidak hanya terbatas pada zakat. Semua dana yang terhimpun di *Baitul Maal* yang berasal dari berbagai sumber juga harus di dayagunakan untuk menghapuskan kemiskinan. Ketika zakat tidak dapat menutupi kebutuhan mereka yang memerlukan, harta kekayaan pemerintahan muslim yang terhimpun di *Baitul Maal* dapat digunakan. Harta *Baitul Maal* yang dimiliki pemerintah terkumpul dengan berbagai

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Musykilah Al-Faqr Wakaiifa...*h.89.

cara. Misalnya dengan menjalankan usaha sendiri, menyewakan sesuatu, menjalankan sistem usaha bagi hasil, hasil pertambangan, dan mengelola sektor-sektor vital bagi masyarakat umum. Kaum miskin juga berhak mendapatkan bagian dari upeti dan segala jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah⁴¹

(5) Sarana Kelima: Sedekah Sukarela dan Kemurahan Hati

Islam tidak hanya menetapkan berbagai kewajiban dan ketentuan di kalangan orang-orang muslim. Islam juga berupaya menciptakan jiwa yang bersih, pemurah, dan penyantun. Kepada umatnya Islam mengajarkan kerelaan untuk memberikan lebih dari permintaan, melaksanakan kewajiban lebih dari tuntutan, mengulurkan tangan tanpa diminta, dan berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit baik dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.⁴²

D. Pemikiran Ekonomi Islam Al-Mawardi

1. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

Dalam islam, prinsip utama dalam kehidupan umat manusia adalah Allah SWT. Yang merupakan zat yang

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Musykilah Al-Faqr Wakaiifa...*h.138-139

⁴² Yusuf Qardhawi, *Musykilah Al-Faqr wakaifa 'Aalajaha al-Islam*, Ter.,Syafiril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiski...",h.160-161

maha Esa. Ia adalah satu-satunya Tuhan dan pencipta seluruh alam semesta, sekaligus pemilik, penguasa serta pemelihara tunggal hidup dan kehidupan seluruh makhluk yang tiada tandingan, baik didunia maupun diakhirat.⁴³

Dalam konteks aktivitas ekonomi, pemikiran dan prakteknya telah dilakukan sejak masa islam itu sendiri lahir dibawah kepemimpinan Rasulullah. Madinah adalah sebuah negara yang sangat maju dan menyisahkan peradaban yang tinggi di semua segi termasuk fundamental dibidang ekonomi yang di sebut dengan ekonomi syariah.⁴⁴ Sejalan dengan ajaran islam tentang pemberdayaan akal pikiran dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis nabi, konsep dan teori ekonomi dalam islam pada hakikatnya merupakan respons para cendikiawan muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada waktu-waktu tertentu. Berbagai praktik dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa Rasulullah SAW dan *al-khulafa al rasyidun* merupakan contoh empiris yang dijadikan pijakan bagi para cendikiawan muslim dalam melahirkan teori-teori ekonominya. Satu hal yang jelas, fokus perhatian mereka tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan, dan kebebasan yang tidak lain merupakan

⁴³ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi...*h.3

⁴⁴ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok:Gramata Publishing,2010), h.1

objek utama yang menginspirasi pemikiran ekonomi islam sejak awal.⁴⁵

2. Biografi Al-Mawardi

Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, Al-Mawardi merupakan nama populernya, adapun nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad Ibn Habib al-Basry Al-Mawardi. Ia dilahirkan di Basrah pada tahun 364 H bertepatan dengan tahun 975 M, dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 450 H bertepatan dengan tahun 1058 M dalam usia 86 tahun.⁴⁶

Al-Mawardi lahir dalam satu keluarga Arab yang membuat dan memeperdagangkan air mawar dan karena itu mendapat nama julukan “Al Mawardi.” Dia menerima pendidikannya pertama di Basrah belajar ilmu hukum dari Abul Qasim Abdul Wahid as-Saimari seorang ahli hukum madzhab Syafi’i yang terkenal. Kemudian pindah ke Baghdad untuk melanjutkan pelajaran hukum tata bahasa dan kesusastraan dari Abdullah al-Bafi dan Syaikh Abdul Hamid al-Isfraini. Dalam waktu singkat ia telah menguasai dengan baik pelajaran-pelajaran Islam termasuk hadits dan *fiqh* seperti juga politik etika dan sastra. Dari menjabat *qadhi* di berbagai tempat kemudian

⁴⁵ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi...*h.8

⁴⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyah (Sistem Pemerintahan Islam)*, (Jakarta:Qhisti Press), 2020, h. 1

diangkat sebagai *qadhi al-Quzat* di Ustuwa sebuah distrik di Nishabur.⁴⁷

3. Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi

Pada dasarnya, pemikiran Ekonomi Al-Mawardi tersebar pada tiga buah karya tulisnya, yaitu Kitab *Adab ad-Dunya wa ad-Din, al-Hawi dan al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Dalam kitab *Adab Addunya Wa Ad-Din* ia memaparkan tentang perilaku ekonomi seorang muslim serta empat jenis mata pencaharian utama yaitu pertanian, perternakan, perdagangan, dan industri. Dalam kitab *Al-Hawi*, disalah satu bagiannya Al-Mawardi secara khusus membahas tentang *mudharabah* dalam berbagai pandangan *mazhab*. Dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* para ahli ekonomi Islam sepakat bahwa merupakan kitab yang paling komprehensif dalam merepresentasikan pokok-pokok pemikiran ekonomi Al-Mawardi tentang sistem pemerintahan dan administrasi negara Islam, seperti hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyatnya, berbagai lembaga negara, penerimaan dan pengeluaran negara, serta institusi *Hisbah*⁴⁸.

Buku ini ditulis al-Mawardi pada paruh pertama abad ke-5 Hijriah. Akan tetapi, kitab *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* ditulis secara sistematis dan runtut dan bagian utama kitab ini membahas tentang masalah

⁴⁷ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi...*h.249

⁴⁸ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonom...*, h.249

perpajakan, persoalan pengelolaan tanah, wilayah pembelanjaan publik dan masalah keuangan terkait lainnya. Satu bab dalam kitab tersebut membahas masalah pemerintahan dan prosedur administrasi, pengawasan pasar, sistem mata uang, pertanian dan sebagainya. Pada aspek administrasi keuangan, Al-Mawardi banyak mengambil pandangan-pandangan Madzhab Hanafi dan Maliki serta Syafi'i sebagai madzhab pegangannya.⁴⁹ Berikut ini beberapa pemikiran ekonomi Al-Mawardi yang berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Islam antara lain :

1) Negara dan Aktivitas Ekonomi

Teori keuangan publik selalu berkaitan dengan peran negara dalam kehidupan ekonomi. Negara dibutuhkan karena berperan untuk memenuhi kebutuhan kolektif seluruh warga negaranya. Permasalahan ini pun tidak luput dari perhatian islam. Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara (*Imamah*) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.⁵⁰

⁴⁹ Azmi, Sabahuddin, *Islamic Economics; Public Finance in Early Islamic Thought*, Terj. Widyawati, *Menimbang Ekonomi Islam; Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal*, (Bandung: Nuansa), 2005, h. 52

⁵⁰ Sabahuddin Azmi, *Islamic Economics; Public Finance in Early Islamic Thought*, Terj. Widyawati, *Menimbang Ekonomi Islam; Keuangan*

Dalam perspektif ekonomi, pernyataan Al-Mawardi ini berarti bahwa negara memiliki peran aktif demi teralisasinya tujuan material dan spiritual. Ia mewajibkan moral bagi penguasa dalam membantu meralisasikan kebaikan bersama, yaitu memelihara kepentingan masyarakat serta mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.⁵¹ Dengan demikian, seperti para pemikir muslim sebelumnya, Al-Mawardi memandang bahwa, dalam islam, pemenuhan kebutuhan dasar setiap masyarakat bukan saja merupakan kewajiban penguasa dari sudut pandang ekonomi, melainkan juga moral dan agama.

Al-Mawardi mengatakan bahwa negara wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik karena setiap individu tidak mungkin membiayai jenis layanan semacam itu. Dengan demikian layanan publik merupakan kewajiban sosial (*fardh kifayah*) dan harus bersandar kepada kepentingan umum. Pernyataan Al-Mawardi ini semakin mempertegas pendapat para pemikir muslim sebelumnya yang menyatakan bahwa untuk pengadaan proyek dalam kerangka pemenuhan kepentingan umum, negara dapat menggunakan dana

Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal, (Bandung: Nuansa), 2005, h. 34

⁵¹ Sabahuddin Azmi, *Islamic Economics; Public Finance in Early Islamic...*h. 40

Baitul Maal atau membebankan kepada individu-individu yang memiliki sumber keuangan yang memadai.⁵²

Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian. Oleh karenanya, pelembagaan *Imamah* (kepemimpinan politik keagamaan), menurutnya adalah *fardhu kifayah* berdasarkan *ijma'* ulama. Tujuan utama negara telah ditetapkan oleh al-Qur'an. Ayat-ayat suci al-Qur'an menekankan kemudahan dan penghapusan kesulitan, menciptakan kemakmuran, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, dan menjamin terhapusnya moral korupsi, kelaparan, dan tekanan mental⁵³. Di samping itu, tugas-tugas negara lainnya adalah sebagai berikut:

- (1) Melindungi agama
- (2) Menegakkan hukum dan stabilitas,
- (3) Memelihara batas negara Islam,
- (4) Menyediakan iklim ekonomi yang kondusif
- (5) Menyediakan administrasi publik, peradilan, dan pelaksanaan hukum Islam

⁵² Sabahuddin Azmi, *Islamic Economics; Public Finance in Early Islamic...*h. 43

⁵³ Sabahuddin Azmi, *Islamic Economics; Public Finance in Early Islamic...*h. 61

- (6) Mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber yang tersedia serta menaikkannya dengan menerapkan pajak baru jika situasi menuntutnya,
- (7) Membelanjakan dana-dana *Baitul Maal* untuk berbagai tujuan yang telah menjadi kewajibannya⁵⁴.

Sedangkan tugas utama seorang penguasa terhadap rakyat menurut Al-Mawardi sebagaimana dikutip Sa'id Hawwa adalah sebagai berikut:

- (1) Menjaga agama dan mengikuti apa yang telah di *ijma*'kan ulama terdahulu.
- (2) Melaksanakan hukum-hukum di kalangan dua pihak yang bertikai dengan tujuan supaya perselisihan di antara mereka dapat diselesaikan.
- (3) Mengawal negara dan mencegah perpecahan. Ini supaya manusia bebas mencari nafkah, bekerja dan melaksanakan kewajiban dengan aman. Tegasnya menjamin keamanan di dalam negeri.
- (4) Melaksanakan hukuman *hudud* supaya dapat menjaga dari pelanggaran hukum-hukum Allah, serta menjaga hak-hak hamba dari kemusnahan dan kebinasaan.
- (5) Mengawal perbatasan dengan persiapan cukup, supaya musuh tidak dapat menyerang kaum

⁵⁴ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonom...*h.249

muslimin secara tiba-tiba. Menghalangi mereka dari membunuh orang-orang Islam atau orang-orang yang mengikat perjanjian (*mu'ahid*) serta menghalangi merajalelanya perkosaan terhadap wanita.

- (6) Melaksanakan jihad menentang musuh sesudah disampaikan dakwah supaya mereka memeluk Islam atau menjadi ahli *dzimmi*.
- (7) Memungut cukai *al-Fai* dan zakat menurut ketentuan *syara'* baik secara nash maupun *ijtihad*, tanpa merasa takut.
- (8) Menentukan pemberian-pemberian dari *Baitul Maal* secara benar dan memberikannya kepada yang berhak tepat pada waktunya.
- (9) Mengangkat pegawai-pegawai yang cakap, berdisiplin dan amanah supaya tugas-tugas dapat diselesaikan dengan baik dan harta-harta dapat terjamin.
- (10) Hendaklah Imam sendiri secara langsung meneliti semua urusan serta mengaji keadaan-keadaan. Ini supaya politik umat dapat maju dan agama dapat terjaga.⁵⁵

Karena tugas dan tanggung jawab negara dan penguasa sangat besar, yakni merealisasikan kesejahteraan

⁵⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyah (Sistem...,h.32*

dan pemenuhan ekonomi secara merata terhadap rakyatnya. Maka, negara harus memiliki sumber-sumber pendapatan keuangan yang dapat menyokong pelaksanaan tanggung jawab tersebut seperti zakat, *ghanimah*, *kharaj*, *jizyah*, dan *ushr*. Akan tetapi, jika sumber-sumber pendapatan negara tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan anggaran negara atau terjadi defisit anggaran, negara diperbolehkan untuk menetapkan pajak baru atau melakukan pinjaman kepada publik⁵⁶.

2) Perpajakan

Dalam masalah perpajakan, al-Mawardi mempunyai pandangan sendiri yang sedikit berbeda dengan trend pendapat pada masa klasik. Menurutnya, keadilan baru akan terwujud terhadap para pembayar pajak jika para petugas pemungut pajak mempertimbangkan setidaknya empat faktor dalam penilaian *kharaj*, antara lain:⁵⁷

- (1) Kesuburan tanah. Karena kesuburan tanah sedikit banyaknya mempengaruhi jumlah produksi.
- (2) Jenis tanaman. Hal ini terjadi karena tanaman ada berbagai jenis dengan variasi harga yang berbeda-beda.
- (3) Sistem irigasi. Tanaman yang menggunakan sistem irigasi manual tidak dapat dikenai pajak yang sama

⁵⁶ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonom...*h.249

⁵⁷ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonom...*h.253-254

dengan tanaman yang menggunakan sistem irigasi alamiah.

(4) Jarak antara tanah yang menjadi obyek *kharaj* dengan pasar. Hal ini penting karena tinggi-rendahnya harga berbagai jenis barang tergantung pada jarak tanah dari pasar.

3) Lembaga keuangan Negara (*Baitul Mal*)

Seperti yang telah dikemukakan, Al-Mawardi menyatakan bahwa untuk membiayai belanja negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya, negara membutuhkan Lembaga Keuangan Negara (*Baitul Mal*) yang didirikan secara permanen. Melalui lembaga ini, pendapatan negara disimpan dari berbagai sumber akan disimpan dalam pos yang terpisah dan dibelanjakan sesuai dengan alokasinya masing-masing. Berkaitan dengan pembelanjaan harta *Baitul Maal*, Al-Mawardi menegaskan bahwa jika dana pada pos tertentu tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan yang direncanakannya, pemerintah dapat meminjam uang belanja tersebut dari pos lain.⁵⁸

Lebih jauh, Al-Mawardi menegaskan tanggung jawab *Baitul Maal* adalah untuk memenuhi kebutuhan publik. Ia mengklasifikasikan berbagai tanggung jawab *Baitul Maal* kedalam dua hal, yaitu

⁵⁸ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonom...* h.255

1. Tanggung jawab timbul dari berbagai harta benda yang disimpan di *Baitul Maal* sebagai amanah untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak
2. Tanggung jawab yang timbul seiring dengan adanya pendapatan yang menjadi aset kekayaan *Baitul Maal* itu sendiri⁵⁹

Seluruh jenis kekayaan yang menjadi milik kaum muslimin secara umum dan bukan milik perorangan secara khusus merupakan bagian dari harta *Baitul Maal*. Oleh karena itu, pendapatan *Fai* yang diperuntukan bagi kaum muslimin tersebut merupakan bagian dari harta *Baitul Maal*.

Lebih jauh Al-Mawardi mengklasifikasikan kategori tanggung jawab *Baitul Maal* yang kedua ini kedalam dua hal. Pertama tanggung jawab yang timbul sebagai pengganti atas nilai yang diterima (*badal*), seperti untuk pembayaran gaji para tentara dan biaya pengadaan senjata. Karena tanggung jawab ini ada seiring dengan nilai yang diterima, negara harus menetapkan tuntutananya. Pelaksanaan tanggung jawab ini menghasilkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, berapa pun besarnya.⁶⁰

Kedua, tanggung jawab yang muncul melalui bantuan dan kepentingan umum. Al-Mawardi menyatakan bahwa

⁵⁹ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonom...*h.255

⁶⁰ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonom...*h.256

pelaksanaan jenis tanggung jawab ini berkaitan dengan keberadaan dana *Baitul Maal*. Jika dapat dana yang cukup di *Baitul Maal*, tanggung jawab negara atas kepentingan publik harus dipenuhi. Akan tetapi, dalam hal tidak ada dana yang cukup di *Baitul Maal*, maka pelaksanaan tanggung jawab tersebut menjadi tanggung jawab sosial (*fardhu kifayah*) seluruh kaum muslimin.⁶¹

Disamping menerapkan tanggung jawab negara, uraian Al-Mawardi tersebut juga menunjukkan bahwa dasar pembelanjaan publik dalam negara islam adalah *maslahah* (kepentingan umum). Hal ini berarti bahwa negara hanya mempunyai wewenang untuk membelanjakan harta *Baitul Maal* selama berorientasi pada pemeliharaan *maslahah* dan kemajuannya.⁶²

Dalam hal pendistribusian pendapatan zakat, Al-Mawardi menyatakan bahwa kewajiban negara untuk mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang fakir dan miskin hanya pada taraf sekadar untuk membebaskan mereka dari kemiskinan. Tidak ada batasan jumlah tertentu untuk membantu mereka karena pemenuhan merupakan istilah yang relatif. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terbebas dari kemiskinan,

⁶¹ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonom...* h.256

⁶² Sabahuddin Azmi, *Islamic Economics; Public Finance in Early Islamic...* h. 120

seseorang bisa jadi hanya cukup membutuhkan satu dinar sementara yang lain membutuhkan 100 dinar.⁶³

Disamping itu, Al-Mawardi berpendapat bahwa zakat harus didistribusikan diwilayah tempat zakat itu diambil. Pengalihan zakat kewilayah lain hanya diperbolehkan apabila seluruh golongan *meustahik* zakat diwilayah tersebut telah menerimanya secara memadai. Kalau terdapat surplus, maka wilayah yang paling berhak menerimanya adalah wilayah yang paling dekat dengan wilayah tempat zakat tersebut diambil.⁶⁴

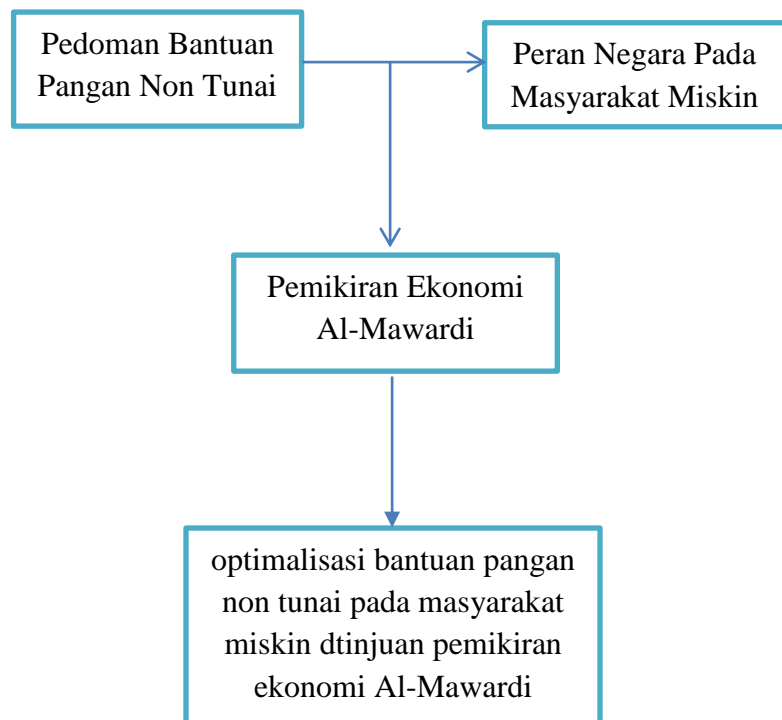
Lebih jauh, Al-Mawardi menyatakan bahwa untuk menjamin pendistribusian harta *Baitul Mal* berjalan lancar dan tepat sasaran, negara harus memberdayakan dewan hisbah semaksimal mungkin. Dalam hal ini salah satu fungsi *mustahib* adalah memerhatikan kebutuhan publik serta merekomendasikan pengadaan proyek kesejahteraan bagi masyarakat umum. Al-Mawardi menegaskan

“Jika mekanisme pengadaan air minum kekota mengalami kerusakan, atau dinding disekitarnya bocor, atau kota tersebut banyak dilintasi oleh para musafir yang membutuhkan air, maka *mustahib* (petugas *hisbah*) harus memperbaiki sistem air minum, merekonstruksikan dinding dan memberikan bantuan keuangan kepada orang-orang miskin, karena hal ini adalah kewajiban *Baitul Mal* dan bukan masyarakat.”

⁶³ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonom...* h.256

⁶⁴ Sabahuddin Azmi, *Islamic Economics; Public Finance in Early Islamic...* h. 124

E. Kerangka Konseptual



BAB III

GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu

Berdasarkan letak geografis Kota Bengkulu terletak di tepi pantai Barat Sumatera dengan posisi 1020 12”-1020 22” Bujur Timur dan 30 45” - 3 0 59” Lintang Selatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986 luas Kota Bengkulu adalah 14.452 Ha. Secara administratif Kota Bengkulu dibatasi oleh :

Sebelah Utara : Kabupaten Bengkulu Utara

Sebelah Selatan : Kabupaten Seluma

Sebelah Barat : Samudra Hindia

Sebelah Timur : Kabupaten Bengkulu Utara⁶⁵

Kota Bengkulu terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 67 Kelurahan, yang pembagian wilayahnya adalah sebagai berikut :

Kecamatan Gading Cempaka, terdiri dari 5 Kelurahan yaitu : Kelurahan Padang Harapan, Kelurahan Jalan Gedang, Kelurahan Lingkar Barat, Kelurahan Cempaka Permai dan Kelurahan Sidomulyo.

⁶⁵ Profil Pemerintah Bengkulu web, dikutip dari <https://profil.bengkulukota.go.id/profil/>, di akses pada Kamis 22 April 2021, pukul 08.31

Kecamatan Singaran Pati, terdiri dari 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Jembatan Kecil, Kelurahan Panorama, Kelurahan Lingkar Timur, Kelurahan Timur Indah, Kelurahan Padang Nangka dan Kelurahan Dusun Beso.

Kecamatan Ratu Agung, terdiri dari 8 Kelurahan yaitu Kelurahan Tanah Patah, Kelurahan Kebun Tebeng, Kelurahan Sawah Lebar, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kelurahan Nusa Indah, Kelurahan Kebun Beler, Kelurahan Kebun Kenanga dan Kelurahan Lempuing.

Kecamatan Ratu Samban, terdiri dari 9 Kelurahan yaitu Kelurahan Anggut Atas, Kelurahan Anggut Bawah, Kelurahan Anggut Dalam, Kelurahan Kebun Geran, Kelurahan Kebun Dahri, Kelurahan Belakang Pondok, Kelurahan Pengantungan, Kelurahan Penurunan dan Kelurahan Padang Jati.⁶⁶

Berdasarkan dasar hukum UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Kelurahan Tanjung Agung merupakan nama sebuah Kelurahan yang terletak di Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu. Pembentukan kelurahan Tanjung Agung pada tahun 2001 yang dulunya merupakan sebuah Desa yang memiliki luas 9.6 Ha.⁶⁷

⁶⁶ Profil Pemerintah Bengkulu web, dikutip dari <https://profil.bengkulukota.go.id/geografis/>, di akses pada Kamis 22 April 2021, pukul 09.20

⁶⁷ *Data Monografi Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu*, Edisi Revisi Tahun 2020, (Bengkulu: Kelurahan Tanjung Agung, 2020), h. 1

B. Kondisi Geografis

Berdasarkan letak geografis kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu terletak secara administratif dibatasi oleh:
Sebelah Utara: berbatasan dengan Kelurahan Rawa Makmur
Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kelurahan Sawah Lebar Baru
Sebelah Barat: berbatasan dengan Kelurahan Sukamerindu
Sebelah Timur: berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Jaya⁶⁸

C. Kondisi Demografis

Kondisi Demografi merupakan kondisi yang dapat menggambarkan bagaimana suatu wilayah tersebut berdasarkan jumlah kelompok umur masyarakat yang ada di wilayah itu sendiri. Kondisi Demografi kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu pada bulan Desember 2020 sebanyak 1020 jiwa. Berdasarkan penggolongan jenis kelamin dengan rincian Laki-laki sebanyak 496 jiwa lebih sedikit dari jumlah Perempuan sebanyak 524 jiwa. Sedangkan berdasarkan golongan kelompok usia di daerah Kelurahan Tanjung Agung pada Desember 2020 dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:⁶⁹

⁶⁸ *Data Monografi Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu...*, h. 1

⁶⁹ *Data Monografi Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu...*, h. 2

Tabel 3.1: kelompok Usia

No	Usia	Jumlah
1	0-6 Tahun	51 orang
2	7-18 Tahun	227 orang
3	19-24 Tahun	142 orang
4	25-55 Tahun	472 orang
5	56 Tahun Keatas	128 orang

Sumber Data Monografi Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu

D. Kondisi Sosial

Kelurahan Tanjung Agung memiliki sarana-sarana yang biasa digunakan untuk menunjang kegiatan pendidikan, agama, dan pelayanan penduduk, diantaranya yaitu :

1 Unit Kantor Kelurahan, 1 Unit Balai pertemuan, 1 Unit puskesmas pembantu, 1 Unit sarana pendidikan TK, 1 Unit sarana PAUD, 1 Unit sarana SDIT dan 2 masjid.⁷⁰

E. Kondisi Pendidikan

Untuk melihat kondisi pendidikan yang ada dikelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu dapat dilihat melalui rician berikut:⁷¹

⁷⁰ *Data Monografi Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu...*, h. 3

⁷¹ *Data Monografi Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu...*, h. 4

Tabel 3.2: Lulusan Pendidikan Umum

No	Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	160 Orang
2	Tidak Tamat SD	63 Orang
3	SD/Sederajat	276 Orang
4	SLTP/Sederajat	124 Orang
5	SLTA/Sederajat	324 Orang
6	Akademi/D1-D3	15 Orang
7	Sarjana	48 Orang
8	Pascasarjana S2	2 Orang
9	Pascasarjana S3	-

Sumber Data Monografi Kelurahan Tanjung Agung 2020

Pendidikan merupakan suatu hal yang terpenting di dalam kehidupan. Dimana dengan adanya pendidikan menjadikan pola pikir masyarakat yang mengenyam pendidikan menjadi lebih terbuka dengan wawasan dalam menganalisa terhadap pengambilan suatu keputusan menjadi sebuah hal yang terarah serta menghasilkan pemikiran yang baik pula. Kemiskinan merupakan suatu hal yang menjadikan sekelompok orang menjadi tidak berdaya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

F. Kondisi Mata Pencaharian

Kondisi mata pencaharian Kelurahan Tanjung Agung terdiri dari PNS sebanyak 23 orang, TNI/POLRI

sebanyak 4 orang, Swasta 46 orang, Buruh harian 67 orang, Pensiunan 12 orang, lainnya sebanyak 272 orang dan tidak bekerja sebanyak 543 orang. Dengan data melalui kategori keluarga yang tidak bekerja menjadi salah satu faktor mengalami kemiskinan, dari data tersebut dapat dilihat bahwa kategori orang yang mengalami perkonomian di bawah rata-rata atau dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin lebih dominan di wilayah Kelurahan Tanjung Agung.⁷²

⁷² *Data Monografi Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu...*, h. 1

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Tanjung Agung

Melalui wawancara terkait dengan Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu, dari informan Bapak Salburata Husein selaku TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) di Wilayah Kecamatan Sungai Serut sekaligus menjadi pendamping menjelaskan bahwa:

“Bantuan Pangan Non Tunai adalah program pemerintah pusat dari kementerian sosial dimana data penerima bantuan merupakan data yang diperoleh dari data pusat yaitu data kementerian sosial, yang biasa disebut dengan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan memiliki 14 kriteria dari pemerintah pusat dan kriteria dari badan pusat statistik sesuai dengan peraturan pedoman bantuan pangan non tunai ini.⁷³

Dari penjelasan bapak Salburata Husein mengenai kriteria yang di ambil dari kementerian sosial, adapun kriteria penerima atau KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

⁷³ Salburata Husein, *Pendamping penyalur Bantuan Pangan Non Tunai Kelurahan Tanjung Agung*, Hasil wawancara pada tanggal 21 Mei 2021.

- 1) Kategori orang miskin dan orang tidak mampu menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang penetapan kriteria dan pendataan fakis miskin dan orang tidak mampu. Kategori-kategori tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, diantaranya:⁷⁴
 - a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
 - b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
 - c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah
 - d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
 - e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

⁷⁴ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

- f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester.
 - g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
 - h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
 - i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
 - j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang.
 - k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.
- 2) Sedangkan kriteria menurut BPS (Badan Pusat Statistik) memiliki 14 kriteria miskin, diantaranya:⁷⁵
- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m²/keluarga.
 - b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.

⁷⁵ Arsip SKPD Batam, *Kriteria Miskin Menurut BPS*, Dikutip Dari <https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/index.html>, Pada 31 Mei 2021.

- c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersamasama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani,nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000/bulan.
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD

- n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp 500.000, seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Terkait penjelasan kriteria baik berdasarkan keputusan menteri sosial maupun kriteria Badan Pusat Statistik yang disampaikan oleh bapak Salburata Husein, dijumpai pada penerima bantuan di Kelurahan Tanjung Agung yang tidak tepat sasaran karena tidak sesuai dengan kriteria baik menurut kategori menteri sosial maupun kriteria dari Badan Pusat Statistik (BPS), hal ini diketahui pada penjelasan dari beberapa informan, diantaranya melalui wawancara dengan ibu Nurhayati sekaligus penerima manfaat bantuan pangan, beliau menjelaskan bahwa:

“...saya merupakan pelaku usaha rumahan ikan pais dan suami saya yang bekerja sebagai tukang bangunan alhamdulillah mendapatkan pekerjaan yang rutin, berdasarkan dari pendapatan di peroleh biasanya setiap bulan sekitar Rp3.000.000-Rp4.000.000 bisa lebih atau bisa kurang dari pendapatan tersebut dan mengenai hal cukup atau tidaknya dalam pemenuhan sebagian bahan pangan saya rasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sebagian bahan pangan...”⁷⁶

Selanjutnya dari observasi yang dilakukan, rumah yang ditempati oleh ibu Nurhayati ini juga dapat

⁷⁶ Nurhayati, *Ketua RT.03 Dan Penerima Manfaat Bantuan Pangan*, Hasil Wawancara Pada Tanggal 25 Mei 2021.

dikategorikan rumah permanen layak huni. Terkait informasi dan pengamatan langsung terhadap informan tentu salah satu penerima bantuan pangan tidak termasuk kedalam kategori layak untuk menerima bantuan.

Melalui wawancara dengan penerima bantuan pangan lainnya, ibu Yuni Ekawati beliau menjelaskan bahwa:

Saya memiliki usaha rumahan yaitu dengan memproduksi krupuk kuning ini, dengan pemasaran yang dijual ke warung-warung serta di kampingan keberbagai tempat. Pendapatan yang didapatkan dalam sebulan memang tidak menentu tetapi jumlah yang terima atau di akumulasikan setiap bulannya saya bisa memperoleh pendapatan bersih sekitar Rp2.000.000,- perbulan selama masa pandemi covid-19, namun sebelumnya lebih dari Rp2.000.000 perbulan.⁷⁷

Selanjutnya beliau menjelaskan dengan hasil wawancara:

“...Menurut saya, penerimaan bantuan ini dirasa kurang cukup pada pemenuhan sebagian bahan pangan namun sudah dapat membantu mengurangi beban pengeluaran bulanan dalam pembelian bahan pangan meskipun kami hanya dapat menukarnya hanya dengan beras dan telur...”⁷⁸

Terkait informasi yang dijelaskan dan dengan melihat langsung bagaimana kondisi rumah dan keadaan dari ibu

⁷⁷ Yuni Ekawati, *Penerima Manfaat Bantuan Pangan*, Hasil Wawancara Pada Tanggal 25 Mei 2021.

⁷⁸ Yuni Ekawati, *Penerima Manfaat Bantuan Pangan*, Hasil Wawancara Pada Tanggal 25 Mei 2021.

Yuni Ekawati, dapat pula di kategorikan sebagai penerima yang tidak layak untuk menerima bantuan pangan

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan ibu Reska selaku penerima bantuan pangan beliau menjelaskan:

“...menurut saya dengan adanya bantuan pangan ini, alhamdulillah sudah mendapatkan bantuan pangan ini, namanya juga manusia kadang-kadang cukup kadang-kadang kurang dengan berbagai bantuan yang diberikan, namun dengan adanya bantuan sembako yang diberikan saya sangat merasa terbantu dalam mengurangi beban pengeluaran setiap bulannya untuk membeli bahan pangan tersebut...”⁷⁹

Selanjutnya melalui wawancara dari informan lain, Ibu Eka beliau menjelaskan:

“...Dengan adanya bantuan sembako/pangan ini. Saya yang hanya seorang ibu rumah tangga dan pendapatan suami yang kurang lebih mendapati penghasilan sebesar Rp500.000,- perbulan tentunya sangat-sangat merasa terbantu dengan penyaluran bantuan pangan ini. Setidaknya kami selalu ada beras setiap bulan untuk dimakan...”⁸⁰

2. Peran Negara pada Masyarakat Miskin Melalui Bantuan Pangan Non Tunai

Dari hasil wawancara dengan Bapak Salburata Husein beliau selanjutnya menjelaskan:

⁷⁹ Reska, *Penerima Bantuan Pangan*, Hasil Wawancara Pada Tanggal 17 Mei 2021.

⁸⁰ Eka, *Penerima Manfaat Bantuan Pangan*, Hasil Wawancara Pada Tanggal 24 Mei 2021.

“...Program ini sudah berlangsung sejak tahun 2017 yang merupakan peralihan bentuk dari bantuan beras untuk masyarakat sejahterah (RASTRA) yang dulunya merupakan bentuk bantuan beras miskin (RASKIN). Penyaluran bantuan pangan atau yang biasa disebut masyarakat luas sebagai bantuan sembako/pangan ini hanya diberikan dalam bentuk beras dan atau telur saja. Saya selaku TKSK yang di tunjuk pemerintah pusat bertugas hanya menyampaikan amanah dari arahan pemerintah dalam penyaluran bantuan pangan ini serta menampung keluhan atau saran dari masyarakat kelompok penerima bantuan...”⁸¹

Terkait penjelasan yang disampaikan oleh bapak Salburata Husein, senada dengan penjelasan dari Ibu Yessi selaku Kasi Pemerintahan di Kelurahan Tanjung Agung dengan penjelasan :

”Biasanya kami menyebutkan bantuan ini dengan sebutan bantuan sembako yang sebenarnya kalau istilah pemerintah menyebutnya Bantuan Pangan Non Tunai yang merupakan Program bantuan sosial dalam bentuk penyaluran bantuan bahan pangan, dan program ini semulanya merupakan pembaruan dari bentuk sebelumnya berupa program beras miskin yang kemudian menjadi program bantuan beras untuk masyarakat sejahterah dan sekarang barulah berubah lagi dengan nama program Bantuan Pangan Non Tunai telah berlangsung sejak bulan April di tahun 2017 hingga sekarang. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai bagi kelompok masyarakat miskin memiliki tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran setiap bulan dan agar masyarakat mampu memenuhi

⁸¹ Salburata Husein, *Pendamping penyalur Bantuan Pangan Non Tunai Kelurahan Tanjung Agung*, Hasil Wawancara pada 21 Mei 2021.

sebagian pangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).⁸²

Selanjutnya beliau menjelaskan bagaimana peran negara melalui pemerintah dalam membantu kepentingan masyarakat miskin melalui program ini, beliau memaparkan:

“...Melalui program ini pemerintah menyalurkan bantuan sosial untuk membantu masyarakat miskin dalam bentuk bantuan pangan sebesar Rp200.000,- per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang disalurkan melalui kartu *e-voucher*. Penyaluran bantuan ini salurkan dari kas pemerintahan pusat yang kemudian pemerintah bekerjasama dengan Bank penyalur Bantuan Pangan Non Tunai yaitu Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) di setiap masing-masing wilayah. Setelah itu barulah Bank menyesuaikan data penerima dengan bantuan yang disalurkan kemudian pihak Bank menghubungi pendamping untuk berkoordinasi dengan para penerima bahwa bantuan sudah masuk ke rekening masing-masing penerima bantuan untuk dapat menukarkan bantuan pangan kepada *e-warung* terdekat...”

Berikut jumlah penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai masyarakat di Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu:⁸³

⁸²Yessi, *Kasi Pemerintahan Di Kelurahan Tanjung Agung*, Hasil Wawancara Pada Tanggal 20 Mei 2021.

⁸³ Yessi, *Kasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Agung*, Hasil Wawancara Pada Tanggal 20 Mei 2021.

Tabel 3.3 : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BPNT di
Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu

No	Tahun	RT 01	RT 02	RT 03	Jumlah
1	2018	26 KK	29 KK	32 KK	87 KK
2	2019	37 KK	37 KK	42 KK	116 KK
3	2020	44 KK	33 KK	45 KK	118 KK

Sumber : Data Primer diolah 2021

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat untuk masyarakat miskin di Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu mengalami peningkatan.

Lebih lanjut Ibu Yessi menjelaskan mengenai peran pemerintah daerah Kelurahan Tanjung Agung dalam mengawasi jalannya penyaluran Bantuan Sosial ini:

“...kami pihak Kelurahan hanya menerima data dari pusat kemudian kami menghubungi masyarakat yang menerima bantuan tersebut melalui pendamping yang di tunjuk. Dalam hal pengawasan kami tidak melakukannya, karena tugas mengawasi dan mendengarkan keluhan dan saran langsung dari masyarakat penerima manfaat bantuan sembako hanya di lakukan oleh pendamping. Tugas kami hanya

memberikan data terbaru, atau menampung masyarakat yang hendak mengajukan menerima bantuan ini, walaupun kadang-kadang pengajuan itu diterima ataupun tidak...⁸⁴

B. Pembahasan

1. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Pemenuhan Sebagian Pangan Masyarakat Miskin di Kelurahan Tanjung Agung

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu berjumlah 118 KK keluarga penerima manfaat pada tahun 2020. Semua KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang menerima bantuan ini dari data baru yang diperoleh saat ini tidak seluruhnya termasuk ke dalam kategori keluarga yang kurang mampu, hal ini disebabkan belum di perbaruinya data lama ke data baru yang ada sekarang. Dengan ketidaksesuaian data ini menyebabkan adanya ketidaktepat sasaran kepada masyarakat Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu.

Bantuan pangan ini di jelaskan pada pedoman Bantuan Pangan Non Tunai merupakan bantuan yang tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai kebutuhan KPM di *E-Warung*, sehingga bentuk

⁸⁴ Yessi, *Kasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Agung*, Hasil Wawancara Pada Tanggal 20 Mei 2021.

memenuhi sebagian kebutuhan pangan masyarakat miskin terhadap pemilihan komoditas pangan dalam Program BPNT berdasarkan tujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM.

Berikut beberapa jenis bahan pokok yang ada diantaranya sebagai berikut:

1. Sumber karbohidrat berupa beras, jagung, gandum dan sagu.
2. Sumber protein hewani berupa telur, daging ayam, daging sapi, dan ikan segar.
3. Sumber protein nabati berupa kacang-kacangan, tempe, dan tahu.
4. Sumber vitamin dan mineral berupa sayur mayur dan buah-buahan.⁸⁵

Perbandingan dengan beberapa pilihan bahan pokok yang tertera diatas, dengan penjelasan yang di sampaikan oleh pendamping penyalur bantuan pangan di hanya dapat ditukar dengan beras dan telur saja menjadikan bantuan ini menjadi kurang optimal dalam pelaksanaannya. Ada beberapa faktor penyebab kurang optimalnya dalam penyaluran program bantuan sosial pangan non tunai ini diantaranya:

⁸⁵ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29/Huk/2020

- 1) Tidak ada pilihan kendali terhadap keluarga penerima manfaat dalam pembelian barang pangan

Salah satu yang menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan dari penyaluran bantuan pangan ialah program dari kementerian sosial melalui bantuan sosial pangan non tunai yang berikan dalam bentuk pemenuhan sebagian kebutuhan pangan masyarakat miskin, untuk membantu dalam pengeluaran setiap bulannya dalam pembelian pangan. Bantuan pangan ini pun di jelaskan pada pedoman Bantuan Pangan Non Tunai tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai kebutuhan KPM di *E-Warung*. Pemilihan komoditas kecuali beras dan telur saja seharusnya lebih diperhatikan mengingat dalam Program BPNT berdasarkan tujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM pada pemenuhan sebagian kebutuhan pangan masyarakat miskin.

- 2) Tidak tepat sasaran penerima manfaat

Pada dasarnya sasaran keluarga penerima manfaat adalah keluarga miskin dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat

(KPM) BPNT, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) BPNT dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan beberapa keluarga yang mendapatkan bantuan pangan itu dari keluarga miskin maupun tidak miskin, tetap ada mendapatkan bantuan pangan. Seperti yang telah di jelaskan oleh ibu Nurhayati selaku ketua RT.03 sekaligus penerima manfaat bantuan pangan, pendapatan yang diperoleh setiap bulan sekitar Rp3.000.000-Rp4.000.000 bisa lebih atau bisa kurang dari pendapatan tersebut dan rumah yang ditempati oleh ibu Nurhayati ini juga dapat dikategorikan rumah permanen layak huni. Hal ini yang menyebabkan pada program Bantuan Pangan Non Tunai terjadi ketidaktepat sasaran penerima dan adanya kecemburuan sosial terhadap masyarakat yang sebenarnya lebih berhak menerima bantuan.

2. Optimalisasi Bantuan Pangan Non Tunai Pada Masyarakat Miskin Kelurahan Tanjung Agung Ditinjau Dari Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi

Optimalisasi merupakan sebuah kata yang memiliki makna tercapainya sebuah hasil yang maksimal atau sesuai dengan harapan yang di

inginkan baik secara efektif dan efisien. Optimalisasi memiliki artian sebuah proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu yang paling baik.⁸⁶ Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang lahir dari sistem sosial Islami yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan keadilan dalam ekonomi umat. Seperti di jelaskan pada surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

⁸⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Web, Dikutip Dari [Http://Kbbi.Web.Id/Optimalisasi](http://Kbbi.Web.Id/Optimalisasi), Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 31 Mei 2021.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁸⁷

Berdasarkan ayat tersebut bahwa Allah telah menyuruh umatnya menyampaikan amanah kepada yang sebenarnya dan apabila menetapkan aturan yang berlaku memperhatikan keadilan. Oleh karena itu, yang di maksud dengan menyampaikan amanah kepada yang sebenarnya diberikan kepada yang benar-benar berhak dengan mendata secara jujur dan yang sebenarnya serta berlaku adil tentunya tidak ada manusia yang benar-benar berperilaku adil tetapi dengan lebih memperhatikan penyaluran bantuan pangan yang sebenarnya di lapangan tentunya akan mewujudkan tujuan dari berjalannya program pemerintah dalam membantu masyarakat miskin untuk mengurangi pengeluaran pembelian bahan pangan setiap bulan.

Al-Mawardi menjelaskan dalam beberapa pemikirannya tentang peran negara terhadap pemenuhan hajat masyarakat miskin, antara lain:

1. Negara Dan Aktivitas Ekonomi

Teori keuangan publik selalu berkaitan dengan peran negara dalam kehidupan ekonomi.

⁸⁷ Sindonews, *Surah An-Nisa Ayat 58*, Dikutip Dari <https://Kalam.Sindonews/Ayat/4/58/An-Nia-Ayat-58> Pada Hari Selasa 01 Juni 2021, Pukul 11.13 WIB

Negara dibutuhkan karena berperan untuk memenuhi kebutuhan kolektif seluruh warga negaranya. Permasalahan ini pun tidak luput dari perhatian Islam. Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara (*Imamah*) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia⁸⁸

Dalam perspektif ekonomi, pernyataan Al-Mawardi ini berarti bahwa negara memiliki peran aktif demi teralisasinya tujuan material dan spiritual. Ia mewajibkan moral bagi penguasa dalam membantu meralisasikan kebaikan bersama, yaitu memelihara kepentingan masyarakat serta stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh, Al-Mawardi menyebutkan tugas-tugas negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara sebagai berikut:

- 1) Melindungi agama
- 2) Menegakkan hukum dan stabilitas
- 3) Memelihara batas negara
- 4) Menyediakan iklim ekonomi yang kondusif
- 5) Menyediakan administrasi publik, peradilan, dan pelaksanaan hukum islam

⁸⁸ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi...*h. 250

- 6) Mengumpulkan pendapatan dari beebagai sumber yang tersedia serta menaikannya dengan menerapkan pajak baru jika situasi menuntutnya
- 7) Membelanjakan dana-dan *Baitul Mal* untuk berbagai tujuan yang telah menjadi kewajibannya.⁸⁹

Berdasarkan pada hasil penelitian yang didapatkan Bantuan Pangan Non Tunai merupakan salah satu program pemerintah untuk memenuhi sebagian kebutuhan bahan pangan masyarakat miskin. Program ini merupakan bentuk wujud negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan sebagian pangan pada masyarakat miskin.

2. Lembaga Keuangan Negara (*Baitul Mal*)

Seperti yang telah dikemukakan, Al-Mawardi menyatakan bahwa untuk membiayai belanja negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya, negara membutuhkan lembaga keuangan negara (*Baitul Mal*) yang didirikan secara permanen. Al-Mawardi menegaskan, adalah tanggung jawab

⁸⁹ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi...*h. 250

Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan publik. Ia mengklasifikasikan tanggung jawab *Baitul Mal* ke dalam dua hal, yaitu:

1. Tanggung Jawab yang timbul dari berbagai harta benda yang disimpan di Baitul Mal sebagai amanah untuk di distribusikan kepada mereka yang berhak
2. Tanggung jawab yang timbul seiring dengan adanya pendapatan yang menjadi aset kekayaan Baitul Mal itu sendiri.

Disamping menetapkan tanggung jawab negara, uraian Al-Mawardi tersebut juga menunjukkan bahwa dasar pembelanjaan publik dalam negara Islam adalah *mashlahah* (kepentingan umum). Hal ini berarti bahwa negara hanya mempunyai wewenang untuk membelanjakan harta *Baitul Maal* selama berorientasi pada pemeliharaan *mashlahah* dan kemajuannya.

Bantuan Pangan Non Tunai memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang, dimana tujuan tersebut dapat tercapai dengan proses penyaluran dan distribusi kepada yang lebih berhak secara tepat sasaran serta memperhatikan dari makna pemenuhan

kebutuhan demi kemashlahatan program dan masyarakat penerima manfaat. Dalam hal pendistribusian zakat Al-Mawardi menyatakan bahwa kewajiban negara untuk medistribusikan harta zakat kepada orang-orang fakir miskin hanya pada taraf sekadar untuk membebaskan dari kemiskinan. Tidak ada batasan jumlah tertentu untuk membantu mereka karena pemenuhan kebutuhan merupakan istilah yang relatif. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terbebas dari kemiskinan, seseorang bisa jadi hanya cukup membutuhkan 1 dinar sementara yang lain mungkin membutuhkan 100 dinar.

Dari penjelasan Al-Mawardi tersebut, dalam program bantuan pangan bahwa dalam penyaluran dan distribusi bantuan pangan untuk lebih memiliki kendali kepada penerima dalam memilih pangan apa saja yang dapat ditukarkan oleh masyarakat keluarga penerima manfaat namun dalam artian kendali pemilihan pangan masih memperhatikan apa saja yang dapat dipilih oleh penerima manfaat seperti yang dijelaskan sebelumnya pangan apa saja yang dapat ditukarkan oleh penerima manfaat di *E-Warung*

penyalur bantuan pangan tersebut. Dalam artian Bank penyalur dana bantuan yang bekerja sama dengan *E-Warung* di Kelurahan Tanjung Agung lebih memberikan pilihan bahan pangan bukan hanya ada pilihan beras dan telur saja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan dalam skripsi “Optimalisasi Bantuan Pangan Non Tunai Pada Masyarakat Miskin Ditinjau Dari Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi (Studi Di Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu)” maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bantuan Pangan Non Tunai program bantuan sosial terhadap masyarakat miskin dalam memenuhi sebagian pangan untuk mengurangi beban pengeluaran setiap bulannya terhadap KPM belum tersalurkan dengan baik karena tidak adanya pemilihan komoditas bahan pangan dan tidak tepat sarannya masyarakat yang menerima bantuan sehingga bantuan ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan sebagian pangan pada masyarakat miskin di Kelurahan Tanjung Agung, disebutkan pada pedoman bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur saja

sesuai kebutuhan KPM di *E-Warung*, sehingga bentuk pemenuhan sebagian kebutuhan pangan masyarakat miskin terhadap pemilihan komoditas pangan dalam penyaluran pangan pada Program BPNT berdasarkan tujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM belum terlaksana dengan baik.

2. Bantuan pangan yang ada di Kelurahan Tanjung Agung pada pelaksanaannya masih ada beberapa kekurangan dalam penyaluran BPNT dimana pemerintah daerah Kelurahan Tanjung Agung belum maksimal dalam mendata keluarga penerima manfaat yang benar-benar dikategorikan miskin di wilayah Kelurahan Tanjung Agung. Sesuai dengan penjelasan Al-Mawardi bahwa negara berperan terhadap pemenuhan hajat masyarakat melalui pemikirannya tentang negara dan aktivitas ekonomi dimana negara dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kolektif setiap warga negaranya. Selanjutnya pada pemikiran ekonomi Al-Mawardi tentang pengelolaan keuangan negara melalui *Baitul Mal* beliau menjelaskan bahwa untuk membiayai belanja negara dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya. Pada pengelolaan penggunaan anggaran penyaluran bantuan sosial BPNT dapat lebih efektif lagi dengan benar-benar menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin di Kelurahan Tanjung Agung dan memberikan pilihan

kendali pada pemilihan bahan pangan yang benar-benar diperlukan pada masyarakat penerima manfaat sehingga penggunaan anggaran negara dalam pemenuhan sebagian bahan pangan dapat terlaksana secara optimal.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemutakhiran data keluarga miskin yang melibatkan pemerintah Kelurahan, Ketua RW, dan Ketua RT untuk mengetahui keluarga yang benar-benar miskin dan layak mendapatkan bantuan.
2. Adanya validasi dan verifikasi data yang turun langsung dari pemerintah pusat (Kementerian Sosial RI).
3. Adanya pembaharuan data yang dilakukan oleh petugas yang bersangkutan dan diserahkan ke pusat.
4. Sebaiknya pangan yang tersedia di setiap E-Warung lebih diperhatikan dengan menyediakan berbagai macam kebutuhan pangan yang ditetapkan pemerintah agar program ini mencapai tujuan pemenuhan gizi masyarakat miskin tercapai secara optimal.
5. Perlu dilakukan penelitian lebih luas bagi peneliti selanjutnya di Kota Bengkulu dan sekitarnya terhadap

penyaluran BPNT yang di berikan kepada masyarakat penerima agar data penerima dan penyediaan bahan pangan yang tersedia di E-Warung benar-benar bermanfaat bagi KPM.

6. Diperlukannya pendataan ulang penerima BPNT sesuai dengan kondisi masyarakat pada proses penetapan penerima bantuan.
7. *E-Warung* penyedia barang sebaiknya lebih banyak menyediakan kebutuhan pangan yang sesuai dengan ketentuan pilihan komoditas bahan pangan BPNT.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar Karim, Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cetakan Keempat. Depok: Rajagrafindo Persada. 2004.
- Adi Saputro, Bayu, dkk, “*Jurnal Nasional Implementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo)*”. Jurusan Administrasi Publik. (2015).
- Akmal, Imal Alimah, “*Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*. Makassar: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. (2020).
- M. Arkoun, *Essais Sur La Pensee Islamique*, Penerjemah: Hidayatullah, *Membedah Pemikiran Islam*, Bandung: Pustaka, 2000.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyah (Sistem Pemerintahan Islam)*, Jakarta: Qhisti Press, 2020.
- Widyawati, *Menimbang Ekonomi Islam; Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal*, Terj. Sabahuddin Azmi. Bandung: Nuansa. 2005.
- Amri, Hoirul, Jurnal Nasional, “*Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Hasan Al-Mawardi*”. Jurnal Economica Sharia. (Agustus 2016).

- Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui E-Warung KUBE. *Data Monografi Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu*, Edisi Revisi Tahun 2020. Bengkulu: Kelurahan Tanjung Agung, 2020.
- Dede Rodin, “*Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Al-Qur’an*”, *Economica*, (2015).
- Diana, Rashda, *Jurnal Nasional “Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam”* Jurnal Peradaban Islam. (Mei, 2017).
- Hakim, Lukman Dan Ahmad Danu Syaputra, “*Jurnal Al-Quran Dan Pengentasan Kemiskinan*”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. (2020).
- Ilmi, Syaiful, “*Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam*”, *Jurnal Al-Maslahah*. (2017).
- Iqbal, Munawar (ed.), *Distributive Justice Need Fulfillment in an Islamic Economy* Islamabad: IIIIE & Leicester UK. The Islamic Foundation. 1988.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia web, di kutip dari <http://kbbi.web.id/miskin>, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, Pukul 14.00 WIB.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia, “*Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*”. (2019).
- Kharismawati, Ika Surya, “*Implementasi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Melalui E-Warung Di Kelurahan Sidosermo*

Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya". Jurnal Nasional. (2017).

Laporan Perekonomian Provinsi Bengkulu Periode Februari 2020.

Laporan Perekonomian Provinsi Bengkulu Periode Agustus 2020. Hakim, Lukman dan Ahmad Danu Syaputra, "*Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan*", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. (2020).

Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan: Instruktur Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Pers. 2005.

Pepi, Ayuni Zalita, "*Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Melalui Elektronik Warung*", Lampung: Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung. 2019.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2018.

Tim Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pangan Secara Non Tunai, "*Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*", Jakarta Pusat: Undang-Undang. 2017.

Halim, Syafril, "*Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*", Ter. Yusuf Qardhawi. Jakarta: Gema Insani Press. 1995.

L

A

M

P

I

R

A

N

BIODATA DIRI



Nama Lengkap : Syalu Eka Pratiwi

NIM : 1711130040

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Kelamin : Perempuan

Golongan Darah : B

Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 31 Maret 1997

Alamat tempat tinggal : Prumnas Tuguhiu Saiyo, Desa Taba
Jambu, Bengkulu Tengah

Status : Mahasiswi, Karyawan Swasta

Prodi/ Jurusan : Ekonomi Syariah

Motto Hidup : Hidup Hanya Menunggu Giliran
Selama Menunggu Hiduplah Dengan
Usaha Terbaik Sebisa Yang Kau
Lakukan

Alamat Email : syaluekapratiwi@gmail.com

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
OPTIMALISASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI PADA
MASYARAKAT MISKIN DITINJAU DARI
PEMIKIRAN EKONOMI AL-MAWARDI

Pedoman Wawancara responden

1. Nama Responden :
2. Usia Responden :
3. Jenis Kelamin Responden :
4. Pendidikan Terakhir Responden :
5. Pekerjaan Responden :

Pedoman Wawancara Untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat)

1. Berapa pendapatan ibu/bapak per bulan?
2. Berapa jumlah anggota keluarga?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)?
4. Bagaimana Bapak/ibu bisa mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai?
5. Berapa jumlah Bantuan Pangan Non Tunai yang diperoleh Bapak/Ibu?
6. Bagaimana mekanisme distribusi Bantuan Pangan Non Tunai?

7. Dimana Bapak/Ibu dapat memperoleh Bantuan Pangan Non Tunai?
8. Setiap tanggal berapa Bapak/Ibu bisa memperoleh Bantuan Pangan Non Tunai?
9. Apakah BPNT sudah cukup bagi Bapak/Ibu dalam pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dalam sebulan?
10. Apakah terdapat pemberian bantuan lain dari pihak selain BPNT?
11. Bagaimana pendapat mengenai bantuan bahan pokok dari bapak/ibu tentang BPNT?

Pedoman Wawancara untuk Pendamping


1. Bagaimana awal mula BPNT ada di kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu?
2. Apa yang menjadi kriteria ditunjuknya sebagai pendamping penyaluran penerima BPNT?
3. Apa saja tugas Bapak/Ibu sebagai pendamping?
4. Bagaimana proses penentuan penerima BPNT?
5. Apa saja kriteria calon penerima BPNT?
6. Bagaimana mekanisme distribusi/penyaluran BPNT?
7. Setiap tanggal berapa KPM bisa menerima BPNT?
8. Berapa jumlah bantuan yang diterima KPM?
9. Apa saja kendala yang sering terjadi dalam penyaluran Bantuan?
10. Apakah terdapat kritik dan saran dari penerima BPNT?

11. Bagaimana Tanggapan dan solusi dari penyelesaian kendala yang ada dalam penyaluran BPNT sebagai pendamping ?

Pedoman Wawancara untuk Kepala Kelurahan

1. Sejak kapan BPNT ada di kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu?
2. Siapa saja yang menjadi sasaran terhadap penerima BPNT ?
3. Bagaimana cara menentukan KPM/warga yang layak menerima BPNT?
4. Apakah pihak kelurahan ikut mengawasi jalannya penyaluran BPNT?
5. Berapa jumlah penduduk di Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu? (berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur)
6. Bagaimana kondisi pendidikan warga? (pendidikan terakhir warga)
7. Apa saja pekerjaan/mata pencaharian warga?

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

**PEMERINTAH KOTA BENGKULU**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/242 /B.Kesbangpol/2021

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu - Nomor : 0657/In.11/F.IV/PP.00.9/05/2021 Tanggal 06 Mei 2021 perihal izin penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

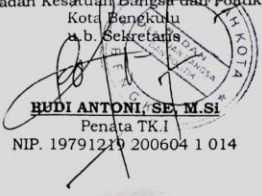
Nama/ NIM : Syalu Eka Pratiwi / 1711130040
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : Optimalisasi Bantuan Pangan Non Tunai Pada Masyarakat Miskin Ditinjau Dari Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi
Daerah Penelitian : Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 18 Mei s/d 18 Juli 2021
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

Dengan Ketentuan : 1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Melakukan kegiatan Penelitian dengan mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19
3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 18 Mei 2021

a.n. WALIKOTA BENGKULU
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bengkulu
a. b. Sekretaris


BUDI ANTONI, S.E., M.Si
Penata TK.I
NIP. 19791219 200604 1 014

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian

Wawancara Bersama Bapak Salburata Husein Selaku Pendamping BPNT



Wawancara Bersama Pemerintahan Setempat di Kelurahan Tanjung Agung



Wawancara Bersama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai dengan Ibu Reska



Wawancara Bersama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai dengan Ibu Yuni Ekawati



Wawancara Bersama Anggota Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai dengan Ibu Eka



Wawancara Bersama Anggota Keluarga Penerima Bantuan Pangan Non Tunai dengan Ibu

